

Riinawati, M.Pd

Dr. Riinawati, M.Pd

M PENGELOLAANKUR STEM PENGELOLAAN KURIKULU



SISTEM PENGELOLAAN KURIKULUM DAN KEUANGAN

Dr. Riinawati, M.Pd



SISTEM PENGELOLAAN KURIKULUM DAN KEUANGAN

ISBN: 978-623-98571-1-0

Hak Cipta pada Penulis

Penulis:

Dr. Riinawati, M.Pd

Editor:

Dr. Hasni Noor, M.Pdi

Layout & Desain

M. Iqbal Assyauqi, M.Pd

Penerbit:

LAFADZ JAYA

© 2020

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

Alamat Penerbit:

PENERBIT LAFADZ JAYA

Jl. Melati Raya VIII BTN Rembiga, Kota Mataram

WA : 081238426727

Email: lafadzjaya@gmail.com

Website: www.publishing.ny.id

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, dengan Asma Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, dengan mengucapkan dan menuliskan ayat pertama surah Al-Fatihah ini, saya awali penulisan buku ini.

Aalhamdulillahirobbil 'alamin, segala puji bagi Allah, dengan menyebut dan menuliskan ayat kedua surah Al-Fatihah ini, saya bersyukur kepada Allah SWT atas limpahan karunia iman, islam, ihsan, akhlaqul karimah, kesehatan, dan kesempatan kepada saya. Teriring do'a, agar limpahan dan karunia Allah SWT selalu mengalir pada diri kita semua termasuk saya dan keluarga saya. Allahumma aamiin.

Buku referensi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai pengelolaan kurikulum dan keuangan pendidikan khususnya pada pendidikan islam. Buku ini juga bertujuan untuk memberi sedikit pencerahan bagi pembaca dan pemerhati penelitian pendidikan.

Akhir kata, semoga buku ini bermakna bagi perkembangan penelitian pada umumnya, dan penelitian pendidikan pada khususnya. Semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca dan pemerhati penelitian pendidikan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iiv
BAB 1 Pendahuluan	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Metode Penelitian	3
BAB 2 Konsep Dasar Pengelolaan Kurikulum Pendidikan Islam.....	5
A. Pengertian Pengelolaan Kurikulum	5
B. Pengelolaan Kurikulum dalam Perspektif Islam.....	12
C. Pengelolaan Kurikulum Pendidikan Islam.....	18
D. Prinsip dan Fungsi Pengelolaan Kurikulum Pendidikan Islam Error! Bookmark not defined. 3	
E. Ruang Lingkup Pengelolaan Kurikulum Pendidikan Islam Error! Bookmark not defined. 8	
BAB 3 Perencanaan Kurikulum Pendidikan Islam.....	50
A. Pengertian Perencanaan Kurikulum Pendidikan Islam.....	50
B. Pokok Bahasan Dalam Perencanaan Kurikulum.....	57
C. Unsur-Unsur yang Terlibat dalam Perencanaan Kurikulum.....	60
D. Fungsi dan Tujuan Perencanaan Kurikulum.....	60
E. Karakteristik Perencanaan Kurikulum.....	62
F. Landasan Perencanaan Kurikulum.....	64
BAB 4 Konsep Dasar Pengelolaan Keuangan Pendidikan Islam	69
A. Pengertian Pengelolaan Keuangan Pendidikan.....	69
B. Ruang Lingkup Pengelolaan Keuangan Pendidikan	73
C. Sumber-Sumber Keuangan Pendidikan	76
D. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Keuangan Pendidikan.....	80
E. Tugas Pengelola Keuangan.....	84
F. Proses Pengelolaan Keuangan	85
BAB 5 Administrasi Keuangan Pendidikan Islam	96
A. Pengertian Administrasi	96
B. Administrasi Pendidikan	97
C. Administrasi Keuangan	99
D. Administrasi Pendidikan Islam	101
BAB 6 Penutup	104
Kesimpulan	104
DAFTAR PUSTAKA	105

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya agama, terutama dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa yang akan datang, telah mendorong munculnya tingkat kebutuhan keberagamaan yang semakin tinggi. Orang tua yang menyekolahkan anaknya di sekolah umum, banyak yang merasakan bahwa pendidikan agama di sekolah umum belum cukup dalam menyampaikan keberagamaan anaknya sampai ketinggian yang memadai untuk mengarungi kehidupannya kelak. Untuk itu sebagian orang tua siswa memasukkan anak-anak mereka ke Madrasah Diniyah. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga pendidikan ini semakin diminati dan dipilih masyarakat, baik untuk menambah pendidikan agama yang diperoleh di sekolah umum maupun untuk memperdalam dan memperluas pemahaman, penghayatan, dan pengalaman ajaran Islam itu sendiri.

Seiring dengan munculnya ide-ide pembaharuan pendidikan di Indonesia, Madrasah Diniyah pun ikut serta mengadakan pembaharuan dari dalam. Beberapa organisasi penyelenggara Madrasah Diniyah banyak yang melakukan modifikasi kurikulum yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, Namun tentu saja disesuaikan dengan kondisi lingkungannya. Kurikulum yang di maknai dengan sekelompok mata pelajaran yang di tawarkan pada Madrasah Diniyah pada umumnya dilakukan secara klasikal dan menggunakan sistem naik kelas, bukan sistem naik kitab

sebagaimana kebanyakan pondok pesantren tradisional, sekalipun kitab yang diajarkan relatif sama yaitu kitab yang berbahasa Arab yang sebagiannya berbentuk kitab kuning. Jadi kurikulum yang digunakan pada umumnya berbasis kurikulum pesantren. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan yaitu bahwa kurikulum yang ditawarkan dianggap terlalu berat untuk tingkat 'ula (dasar) atau santri dengan latar belakang sekolah umum yang akan belajar pada Madrasah Diniyah. Kurikulum yang ada di Madrasah Diniyah sulit untuk dibangun dalam sebuah kerangka yang utuh, karena muatannya padat dan banyak yang mengacu kepada kitab-kitab kuning dengan latar belakang keilmuan yang bermacam-macam.

Untuk meningkatkan mutu pendidikan tentu saja diperlukan pengelolaan yang baik terutama pengelolaan kurikulum dan pendanaan madrasah, sementara masalah pokok yang dihadapi Madrasah Diniyah saat ini adalah kurikulum yang dianggap berat dan pendanaan yang masuk tidak mencukupi, sehingga mengalami kesulitan untuk mengembangkan Madrasah Diniyah ke arah yang lebih maju.

Pengelolaan keuangan madrasah yang baik dan benar perlu dilakukan untuk menunjang penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka mengefektifkan kegiatan belajar-mengajar, dan meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Hal ini penting bagi yang memberikan kewenangan kepada madrasah untuk mencari dan memanfaatkan berbagai sumber dana sesuai dengan keperluan masing-masing madrasah karena pada umumnya dunia pendidikan selalu dihadapkan pada permasalahan keterbatasan dana dan program yang harus dilakukan cukup banyak, sementara sumber daya yang dimiliki sangatlah terbatas. Dana pendidikan merupakan potensi yang sangat menentukan dan

bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kajian pengelolaan pendidikan. Maka dari itu, adanya pengelolaan keuangan atau pembiayaan pada suatu sekolah atau madrasah, merupakan upaya yang menentukan terlaksananya kegiatan proses belajar mengajar di sekolah bersama komponen yang lain.

B. Rumusan Masalah

Melihat dari latar belakang tersebut, penulis bertujuan untuk: memperoleh gambaran tentang bagaimana sistem pengelolaan kurikulum yang diterapkan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi di Madrasah, serta untuk mendeskripsikan sistem pengelolaan keuangan yang meliputi penggalan sumber, pengalokasian, pemanfaatan dan pelaporan keuangan Madrasah.

C. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif karena dalam mendeskripsikan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati akan lebih tepat menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif (menggambarkan apa adanya). Metode deskriptif dalam penelitian ini bukan bermaksud untuk menguji hipotesis, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang sesuatu aspek, gejala atau keadaan. Dengan metode ini peneliti berupaya untuk memperoleh dan mengumpulkan, mendeskripsikan data sebagaimana yang terjadi di lapangan secara alami. Untuk mengefektifkan pengumpulan data tersebut peneliti akan bertindak sebagai key instrumen (instrumen utama). Hal ini sesuai dengan salah satu karakteristik penelitian kualitatif. Dalam kapasitas sebagai key instrumen, peneliti bertindak sebagai perencana dan pelaksana pengumpulan data di lapangan sekaligus juga sebagai penafsir, analis dan pelapor hasil penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan pada Madrasah. Adapun data yang ingin digali dalam penelitian ini adalah informasi atau keterangan

yang berkaitan dengan tujuan/objek penelitian yaitu sistem pengelolaan kurikulum dan keuangan Madrasah yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan sistem pengawasan yang dijalankan di Madrasah, disamping itu, digali pula data penunjang yang meliputi Sejarah berdirinya Madrasah, Keadaan guru dan tata usaha serta keadaan siswanya. Sumber data dalam penelitian adalah pengelola yayasan, kepala madrasah, bendahara madrasah, dan guru.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara, observasi secara mendalam, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu dimulai dari lapangan atau fakta empiris dengan cara terjun ke lapangan, mempelajari fenomena yang ada dilapangan . Pada reduksi data peneliti memilih dan memusatkan perhatian untuk menyederhanakan, mengabstraksi dan mentransformasi data, yang didapat dari catatan-catatan tertulis di lapangan dan menganalisisnya. Peneliti melakukan tahapan-tahapan dari proses reduksi, yang meliputi membuat ringkasan, mengkode dan menulis memo. Untuk memudahkan pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti melakukan langkah-langkah penelitian dengan menggunakan perencanaan yang meliputi perumusan dan pembatasan masalah serta merumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diarahkan pada kegiatan pengumpulan data. Kemudian merumuskan situasi penelitian, satuan dan lokasi yang dipilih serta informasn-informan sebagai sumber data. Memulai Pengumpulan data dasar dan terakhir mengumpulkan data penutup.

BAB 2

KONSEP DASAR PENGELOLAAN KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM

A. Pengertian Pengelolaan Kurikulum

Sebelum mendefinisikan apa itu pengelolaan kurikulum, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu definisi pengelolaan dan definisi kurikulum. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. Nugroho (2003:119) mengemukakan bahwa Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu pengelolaan. Secara etomologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (*to manage*) dan biasanya merujuk pada

proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu pengelolaan yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Sedangkan menurut Syamsu menitikberatkan pengelolaan sebagai fungsi pengelolaan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengontrolan untuk mencapai efisiensi pekerjaan. Pengelolaan atau yang sering disebut pengelolaan pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Istilah pengelolaan berasal dari kata kerja *to manage* yang berarti menangani, atau mengatur. Dari pengertian pengelolaan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengertian Pengelolaan yaitu bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, yang meliputi fungsi-fungsi pengelolaan, seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Sedangkan kurikulum itu sendiri memiliki pengertian sebagai berikut:

- 1) Kata kurikulum diambil dari bahasa Latin yaitu *curere*, yang artinya lintasan perlombaan lari. Dimana dalam lintasan lari ada garis *start* dan ada garis *finish*. Dalam dunia pendidikan diartikan bahwa bahan belajar ada awal dan ada akhirnya.
- 2) Pada Tahun 1956, *Ralph W Tyler* mendefinisikan kurikulum sebagai "*All of the learning of the students which is planned by and directed by the school to attain educational goals.*" Artinya "Semua pembelajaran siswa yang direncanakan dan diarahkan oleh sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan".
- 3) Menurut *Ornstein dan Hunkins* "Kurikulum adalah seluruh pengalaman murid yang didapat dari gurunya"
- 4) Kurikulum adalah jembatan yang sangat vital untuk mencapai titik akhir suatu perjalanan yang ditandai dengan mendapatkan ijazah.
- 5) Kurikulum adalah rencana pelajaran.

- 6) Di dalam UU Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003 dijelaskan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu.

Kurikulum sebagai rancangan pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam seluruh aspek kegiatan pendidikan. Mengingat pentingnya peranan kurikulum di dalam pendidikan dan perkembangan kehidupan peserta didik, maka dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum tidak bisa dilakukan secara sembarangan, dalam melakukan proses penyelenggaraan pendidikan, sehingga dapat memfasilitasi tercapainya sasaran pendidikan dan pembelajaran secara efektif dan efisien.

Dalam perkembangannya kurikulum dipakai dalam dunia pendidikan, yang memiliki arti sebagai berikut:

- 1) Kurikulum sebagai sejumlah mata pelajaran disekolah atau di perguruan tinggi yang harus ditempuh untuk

mendapatkan ijazah atau naik tingkat. Berdasarkan pengertian diatas dapat dikatakan bahwa kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang disajikan guru kepada siswa untuk mendapatkan ijazah atau naik tingkat.

- 2) Kurikulum bukan sekedar sejumlah mata pelajaran, tetapi sesuatu yang nyata terjadi dalam proses pendidikan. Dengan kata lain, kurikulum berarti semua pengalaman, kegiatan dan pengetahuan siswa dibawah bimbingan dan tanggungjawab sekolah atau guru. Pengertian kurikulum ini memberikan implikasi pada program sekolah, bahwa semua kegiatan yang dilakukan siswa dapat memberikan pengalaman belajar.

Banyak definisi yang diutarakan oleh ahli pendidikan. Berikut ini beberapa definisi dari pengelolaan kurikulum oleh para ahli:

- 1) Pengelolaan kurikulum adalah proses mendayagunakan semua unsur pengelolaan dalam rangka

memaksimalkan pencapaian tujuan kurikulum pendidikan yang dilaksanakan di lembaga pendidikan.

- 2) Pengelolaan kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komperhensif, sistemik, dan sistematis dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum.
- 3) Menurut *Mulyasa*, pengelolaan kurikulum adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kurikulum.

Dari beberapa pengertian pengelolaan kurikulum diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kurikulum merupakan proses pendayagunaan semua unsur pengelolaan yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, penilaian, dan evaluasi kurikulum secara kooperatif, komperhensif, sistemik, dan sistematis dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum pendidikan yang dilaksanakan di lembaga pendidikan.

Pengelolaan kurikulum adalah segenap proses usaha bersama untuk memperlancar pencapaian tujuan pembelajaran

dengan dititik beratkan pada usaha meningkatkan kualitas interaksi belajar mengajar. Manajemen Kurikulum menekankan pada suatu sistem kurikulum yang berorientasi pada produktivitas, dimana kurikulum tersebut berorientasi pada peserta didik, kurikulum dibuat agar dapat membuat peserta didik dapat mencapai tujuan hasil belajar. Kurikulum merupakan upaya untuk mengurus, mengatur, dan mengelola perangkat mata pelajaran yang akan diajarkan pada lembaga pendidikan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Proses pengelolaan dalam kurikulum sangatlah penting agar pelaksanaan pendidikan dapat berjalan dan secara tepat dapat mencapai sarannya. Pengelolaan kurikulum adalah sebagai suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematis dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Otonomi yang diberikan pada lembaga pendidikan atau madrasah dalam mengelola kurikulum secara mandiri dengan memprioritaskan kebutuhan dan ketercapaian sasaran dalam visi dan misi lembaga pendidikan atau madrasah tidak mengabaikan kebijakan nasional yang telah ditetapkan.

B. Pengelolaan Kurikulum dalam Perspektif Islam

Islam memandang bahwa pembinaan sumber daya manusia tidak dapat dilepaskan dari pemikiran mengenai manusia itu sendiri. Dengan demikian Islam berarti memiliki konsep yang sangat jelas, utuh dan komprehensif mengenai pembinaan sumber daya manusia. Konsep ini tetap aktual dan relevan untuk diaplikasikan sepanjang zaman. Salah satu upaya di dalam melakukan proses pembinaan sumber daya manusia yaitu melalui kurikulum pendidikan yang dikelola dengan baik melalui sebuah proses pengelolaan yang disebut dengan pengelolaan kurikulum. Untuk mengetahui bagaimana proses implementasi pengelolaan kurikulum dalam perspektif Islam kita dapat melihatnya dari sejarah perkembangan Islam yang berpengaruh terhadap sejarah pendidikan Islam.

Sejarah pendidikan Islam terbagi kedalam empat periode, yaitu:

- 1) periode pembinaan, dimulai sejak kelahiran Islam yang ditandai dengan turunnya wahyu pertama sampai akhir masa kekuasaan Bani Umayyah (610-750);
- 2) periode keemasan, dimulai dari lahirnya Bani Abbasiyyah sampai jatuhnya Baghdad dengan kedatangan Mongol (750-1258M);
- 3) periode kejatuhan dan kemunduran, dimulai dengan Imperium Turki Usmani hingga kemerdekaan Negara negara Islam (125- 1800M);
- 4) periode pembaharuan dan pembinaan kembali, dari kemerdekaan negara-negara Islam dan Imperium Turki Usmani hingga sekarang (1800-sekarang)

Setiap periode diatas memiliki coraknya tersendiri. Dan salah satu indikator kemapanan sistem pendidikan Islam ditandai dengan lahirnya madrasah pada periode keemasan. Pendidikan Islam senantiasa bertransformasi dari awalnya pendidikan diadakan di rumah-rumah sampai kepada *kuttab* dan masjidmasjid. Pengelolaan kurikulum *kuttab* masih bersifat sederhana yang berupa tulis-baca, hafalan Alquran, dan pokok-pokok ajaran Islam. Pada masa

pemerintahan *Umar Ibn al Khattab*, muncul ide pembaharuan *kuttab*. *Umar* mengintruksikan agar anak-anak di *kuttab* diberikan materi pelajaran berenang, mengendarai kuda, memanah, dan tata bahasa Arab. Akan tetapi, Instruksi *Umar* tidak semua dilaksanakan pada tiap *kuttab* karena pada tiap *kuttab* situasinya berbeda. Berenang misalnya, hanya dapat dilaksanakan pada *kuttab* yang tempatnya berada ditepi sungai, seperti *kuttab* di Irak dan Mesir.

Sedangkan pengelolaan kurikulum yang dikembangkan madrasah pada awalnya, hanya meliputi ilmu-ilmu agama, dengan hukum Islam (*fiqh*) dan teologi Islam (*kalam*) sebagai studi pokoknya. Seiring dengan kemajuan peradaban Islam, di madrasah kemudian dikembangkan pula kajian tentang ilmu ilmu rasional, seperti berhitung, sejarah sastra, dan lain-lain. Selanjutnya pengelolaan kurikulum dapat dikategorikan menjadi ilmu-ilmu agama; seperti *fiqh*, *kalam*, sastra Arab, dan lain-lain. Ilmu-ilmu rasional seperti ilmu-ilmu kealaman yang meliputi filsafat, matematika dan kedokteran. Madrasah

merupakan titik awal dari kebangkitan dan kemapanan sistem pendidikan Islam. Tetapi, karena lembaga lembaga pendidikan Islam pendahulunya (*kuttab, masjid*) dinilai tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan dan tuntutan umat Muslim, maka kelahiran madrasah agaknya menjadi keharusan historis demi terwujudnya sistem kelembagaan pendidikan Islam yang profesional. Pengelolaan kurikulum dan metode pendidikan Islam (Tentang metode yang digunakan dalam pembelajaran, terdapat dua metode pengajaran di madrasah, yakni debat tertulis (*ta'liqah*) dan debat lisan) yang ada di dalamnya dikembangkan dan disesuaikan agar dapat ikut berperan bagi kemajuan peradaban Islam. Madrasah abad pertengahan sesungguhnya merupakan sistem kelembagaan pendidikan Islam yang lengkap (*fulfill education system*). Dari madrasah pula kemudian dikembangkan konsep *al-jami'ah* seperti yang sekarang dikenal dengan universitas.

Aplikasi pendidikan Islam pada universitas Islam abad pertengahan tersebut bertalian erat dengan tujuan filosofi pendidikan Islam. Tujuan universitas Islam (*al-*

jami'ah) dirumuskan sesuai dengan tujuan filosofis pendidikan Islam, yakni membentuk manusia Muslim yang taat beribadah kepada Allah Swt. Secara total, sekaligus dapat memakmurkan serta mendayagunakan sumber daya alam yang dilimpahkan Allah Swt bagi kemaslahatan kehidupan manusia. Dari tujuan ideal tampak bahwa dalam tujuan pendidikan universitas Islam berupaya mengintegrasikan aspek moral-spiritual dan fisik material. Unsur integral tersebut menjadi karakteristik pokok pendirian universitas Islam. Dalam upaya merealisasikan tujuan filosofis pendidikan Islam, universitas (*al-jami'ah*) di atas, pengelolaan kurikulum universitas Islam disusun dalam dua bentuk, yakni pengelolaan kurikulum keagamaan dan pengelolaan kurikulum keilmuan. Klasifikasi pengelolaan kurikulum ke dalam dua bidang pokok ini merupakan pengaruh dari pola klasifikasi ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh Ibnu Khaldun seperti tertera dalam bukunya *Muqaddimah Ibnu Khaldun*. Pengelolaan kurikulum bersifat keagamaan terdiri dari; Ilmu Nahwu, Ilmu Fiqh, Ilmu Kalam, *Kitabah*, 'Arudh, dan

Ilmu Sejarah. Sedangkan pengelolaan kurikulum yang bersifat keilmuan terdiri dari: Metafisika, Filsafat, Kedokteran, Musik, dan lain-lain. Dengan pengelolaan kurikulum seperti itu, sejumlah metode pembelajaran yang digunakan di universitas Islam untuk mentransformasikan ilmu pengetahuan, antara lain: metode ceramah (*muhadarah*), disputasi (*munazarah*), korepondensi (*murasalah*), dan *licentia educando* (*alijazah*).

Pengelolaan Kurikulum Pendidikan Islam pada dasarnya adalah gabungan tiga suku kata yaitu: pengelolaan, kurikulum dan pendidikan Islam.

Dapat disimpulkan bahwa Islam sudah mempraktekkan proses pengelolaan kurikulum dan memiliki coraknya tersendiri dalam setiap periode perkembangannya yang berpengaruh terhadap sejarah pendidikan Islam. Pendidikan Islam senantiasa bertransformasi dari awalnya pendidikan diadakan di rumah-rumah sampai kepada *kuttab* dan masjidmasjid, madrasah, sampai *al-jamiah*. Hal ini disebabkan karena Islam memiliki konsep yang sangat jelas, utuh dan

komprehensif mengenai pembinaan sumber daya manusia dimana konsep ini tetap aktual dan relevan untuk diaplikasikan sepanjang zaman.

C. Pengelolaan Kurikulum Pendidikan Islam

1. Pengertian Pendidikan Islam

- a) Pendidikan Islam adalah pembentukan kepribadian muslim, atau perubahan sikap dan tingkah laku sesuai dengan petunjuk ajaran Islam.
- b) Pendidikan Islam pada dasarnya merupakan pendidikan yang bertujuan untuk membentuk pribadi Muslim seutuhnya (*kaffah*) mengembangkan seluruh potensi manusia baik yang berbentuk jasmani maupun rohani.
- c) Pendidikan Islam adalah proses mengubah tingkah laku individu pada kehidupan pribadi, masyarakat, dan alam sekitarnya, dengan cara pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan sebagai profesi diantara profesiprofesi asasi dalam masyarakat.

d) Pendidikan Islam merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan terencana dan sistematis untuk mengembangkan potensi anak didik berdasarkan pada kaidah-kaidah agama Islam. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan pribadi manusia secara menyeluruh melalui latihanlatihan kejiwaan, akal pikiran, kecerdasan, perasaan serta panca indera yang dimilikinya. Dan adapun tujuan akhir pendidikan adalah pembentukkan tingkah laku Islami (akhlak mulia) dan kepasrahan (keimanan) kepada Allah berdasarkan pada petunjuk ajaran Islam (Al-Qur'an dan Hadis).

e) Pendidikan Islam adalah suatu proses mempersiapkan generasi penerus untuk mengisi peranan, memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat. Pendidikan Islam dalam pengertian di atas

merupakan suatu proses pembentukan individu berdasarkan ajaran Islam yang diwahyukan Allah kepada Muhammad melalui proses dimana individu dibentuk agar dapat mencapai derajat yang tinggi, sehingga mampu menunaikan tugasnya sebagai *kholifah* di bumi yang dalam kerangka lebih lanjut mewujudkan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

- f) Pendidikan Islam didefinisikan sebagai proses transformasi dan internalisasi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai pada diri anak didik melalui penumbuhan dan pengembangan potensi fitrahnya guna mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup dalam segala aspeknya.

Adapun tujuan dari pendidikan Islam menurut *Sayid Sabiq* yaitu mendidik jiwa seseorang agar dapat terdidik secara sempurna, serta dapat menunaikan kewajiban kewajiban karena Allah SWT, dan senantiasa berusaha untuk kepentingan keluarga, kepentingan masyarakat, dapat berkata jujur, berpihak kepada yang

benar, serta berkeinginan untuk mengembangkan benih-benih kebahagiaan pada manusia.

2. Pengertian Pengelolaan Kurikulum Pendidikan Islam

Sebagaimana telah dibahas diatas, tentang pengertian pengelolaan kurikulum dan pengertian pendidikan Islam, maka dapat kita simpulkan pengertian dari pengelolaan kurikulum pendidikan Islam adalah sebuah proses pendayagunaan semua unsur pengelolaan yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, penilaian, dan evaluasi kurikulum secara kooperatif, komperhensif, sistemik, dan sistematis dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum pendidikan Islam yaitu mengembangkan potensi peserta didik berdasarkan pada kaidah-kaidah agama Islam yang dilaksanakan di lembaga pendidikan.

Kurikulum pendidikan Islam memiliki ciri-ciri khusus, yang kesemuanya bermuara pada 'akhlak mulia'. Secara lebih rinci ciri kurikulum pendidikan yang berlandaskan Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Menonjolkan tujuan agama dan akhlaqul karimah, baik dalam tujuan pengajaran, materi dan gerak pelaksanaannya.
- 2) Kandungan materi pendidikan mencakup aspek jasmaniah, intelektual, psikologi, dan spiritual.
- 3) Adanya keseimbangan antara ilmu syariah dengan ilmu-ilmu aqliyah;
- 4) Tidak mengesampingkan bakat dan apresiasi seni, tetapi juga tidak menghalangi perkembangan akhlak;
- 5) Adanya pertimbangan terhadap kondisi psikologis peserta didik.

Sedangkan menurut *Mujamil Qomar* Kurikulum pendidikan Islam memiliki ciri-ciri tertentu, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Menonjolkan tujuan agama dan akhlak pada berbagai tujuan, kandungan, metode, alat, dan tekniknya;
- 2) Memiliki keseimbangan antara kandungan kurikulum dari segi ilmu dan seni, kemestian,

pengalaman, dan kegiatan pengajaran yang beragam;

- 3) Memiliki perhatian yang luas dan kandungan yang menyeluruh. Maksudnya ialah aspek pribadi siswa tepat pada sasaran terutama aspek pribadi siswa yaitu jasmani, akal, dan rohani;
- 4) Berkecenderungan pada seni halus, aktivitas pendidikan jasmani, latihan militer, pengetahuan teknik, latihan kejuruan, dan bahasa asing untuk perorangan maupun bagi mereka yang memiliki kesediaan, bakat, dan keinginan;
- 5) Keterkaitan kurikulum dengan kesediaan, minat, kemampuan, kebutuhan, dan perbedaan perorangan di antara mereka.

D. Prinsip dan Fungsi Pengelolaan Kurikulum Pendidikan Islam

1. Prinsip Pengelolaan Kurikulum

Ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi dalam pengelolaan kurikulum yang baik, diantaranya:

- a) Produktivitas, artinya berorientasi pada hasil yang dicapai,yaitu peserta didik mampu mencapai hasil belajar sesuai tujuan kurikulum;
- b) Demokratisasi, yaitu menempatkan pengelola, pelaksana, dan subjek didik pada posisi yang seharusnya untuk mencapai tujuan kurikulum;
- c) Kooperatif, yaitu kerjasama yang baik dari semua pihak yang terlibat;
- d) Efektifitas dan efisiensi, artinya mampu mencapai hasil maksimal dengan biaya,tenaga,dan waktu yang singkat;
- e) Mengarahkan visi, misi, dan tujuan kurikulum.

Menurut *Mulyasa* Prinsip-prinsip kurikulum bermutu dapat dideskripsikan sebagai berikut:

- a) Keimanan, yaitu nilai-nilai budaya, budi pekerti yang perlu digali ,dipahami,dan diamankan untuk mewujudkan karakter dan martabat bangsa;
- b) Integritas Nasional, yaitu usaha dan proses dalam menyatukan perbedaan yang ada pada suatu

lembaga pendidikan agar tercipta keserasian dan keselarasan;

- c) Keseimbangan etika, logika, estetika, kinestetika;
- d) Perkembangan pengetahuan dan teknologi informasi;
- e) Pengembangan kecakapan hidup yang mencakupi: keterampilan berfikir, keterampilan sosial, keterampilan akademik, dan keterampilan vokasional;
- f) Belajar sepanjang hayat;
- g) Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungan;
- h) Relevan dengan kebutuhan kehidupan.

Prinsip Pengelolaan Kurikulum menurut *Bryan Independent School District* yaitu:

- 1) Pengembangan kurikulum bersifat dinamis dan mencakup proses pengelolaan, pengembangan, dan penyampaian kurikulum;
- 2) Pengembangan kurikulum mencerminkan pemahaman terbaik tentang pertumbuhan dan perkembangan peserta

didik dalam masyarakat yang berubah, kebutuhan masyarakat, praktik berbasis penelitian, undang-undang negara, dan persyaratan Dewan Pendidikan Negara Bagian;

- 3) Standar dan harapan siswa, dan menyediakan kerangka kerja untuk pengembangan serangkaian inti tujuan / harapan pelajar yang tidak dapat diukur dan terukur yang disesuaikan secara vertikal dan horizontal. Hasilnya adalah ruang lingkup dan dokumen urutan yang terartikel dengan baik untuk semua area konten dan tingkat kelas yang memandu keputusan tentang pengajaran dan pembelajaran;
- 4) Dokumen kurikulum disesuaikan dan mudah diakses;
- 5) Kurikulum dinilai dengan penilaian formatif dan sumatif di tingkat kampus, kelas, dan individu.

2. Fungsi Pengelolaan Kurikulum

- a) Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum;
- b) Meningkatkan keadilan dan kesempatan kepada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal;

- c) Meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta didik;
- d) Meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran;
- e) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar;
- f) Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan.

Sedangkan dalam Pendidikan Islam terdapat beberapa prinsip umum yang menjadi dasar kurikulum pendidikan Islam, yaitu:

- 1) Pertautan yang sempurna dengan agama, termasuk ajaran-ajaran dan nilai-nilainya.
- 2) Prinsip menyeluruh (universal) pada tujuantujuan dan kandungan-kandungan kurikulum.
- 3) Keseimbangan yang relatif antara tujuantujuan dan kandungan-kandungan kurikulum.

- 4) Ada pertautan antara bakat, minat, kemampuan, dan kebutuhan pelajar.
- 5) Pemeliharaan perbedaan individual di antara pelajar dalam bakat, minat, kemampuan, kebutuhan, dan masalahnya serta memelihara perbedaan di antara alam sekitar dan masyarakat.
- 6) Prinsip perkembangan dan perubahan.
- 7) Prinsip pertautan antarmata pelajaran, pengalaman, dan aktivitas yang terkandung dalam kurikulum.

E. Ruang Lingkup Pengelolaan Kurikulum Pendidikan Islam

Secara umum pengelolaan kurikulum memiliki Ruang lingkup yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum tidak terkecuali dalam pengelolaan kurikulum pendidikan Islam. Pendidikan Islam sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan agama dan pendidikan nasional, keberlangsungannya di jamin oleh Undang-Undang. Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2007

mendefinisikan Pendidikan agama sebagai pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Adapun fungsinya untuk membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antarumat beragama. Pendidikan agama bertujuan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Pemerintah mewajibkan seluruh satuan pendidikan di semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan agama. Adapun pengelolaannya dilaksanakan oleh Menteri Agama.

Kurikulum pendidikan agama harus mengacu dan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Pada tingkat

satuan pendidikan, ruang lingkup pengelolaan kurikulum lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional (standar kompetensi/ kompetensi dasar) dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan, sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang tidak terpisah dengan peserta didik maupun dengan lingkungan sekolah.

Berikut adalah penjelasan secara rinci terhadap ruang lingkup pengelolaan kurikulum sebagaimana yang telah disebutkan diatas:

1. Perencanaan Kurikulum

Hamalik menyatakan bahwa dalam perencanaan kurikulum hal pertama yang dikemukakan ialah berkenaan dengan kenyataan adanya gap atau jurang antara ide-ide strategi dan pendekatan yang dikandung oleh suatu kurikulum dengan usaha-usaha implementasinya. Gap ini disebabkan oleh masalah keterlibatan personal dalam perencanaan kurikulum

yang banyak bergantung pada pendekatan perencanaan kurikulum yang dianut.

Terdapat dua pendekatan pendekatan dalam perencanaan kurikulum, yaitu pendekatan yang bersifat “administrative approach” dan pendekatan yang bersifat “grass roots approach”. Pendekatan yang bersifat “administrative approach” kurikulum direncanakan oleh pihak atasan kemudian diturunkan kepada instansiinstansi bawahan sampai kepada guru-guru. Jadi from the top down, dari atas ke bawah atas inisiatif para administrator. Dalam hal ini tidak banyak yang dapat dilakukan oleh bawahan dalam melakukan perencanaan kurikulum, karena atasanlah yang memiliki kuasa penuh dalam melakukan perencanaan tersebut. Pendekatan yang bersifat “grass roots approach” yaitu, dimulai dari bawah. Pendekatan ini menekankan pada perencanaan kurikulum yang melibatkan bawahan bahkan pada tingkat guru-guru untuk dapat bersama-sama memikirkan ide baru

mengenai kurikulum dan bersedia menerapkannya untuk meningkatkan mutu pelajaran.

Dalam perencanaan kurikulum setidaknya terdapat beberapa hal yang menjadi kegiatan pokok, yaitu, perumusan tujuan, perumusan isi, merancang strategi pembelajaran, merencanakan strategi penilaian. Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang ingin diharapkan. Dalam skala makro rumusan tujuan kurikulum erat kaitannya dengan filsafat atau sistem nilai yang dianut masyarakat.

Selanjutnya isi kurikulum adalah keseluruhan materi dan kegiatan yang tersusun dalam urutan dan ruang lingkup yang mencakup bidang pengajaran, mata pelajaran, masalah-masalah, proyek-proyek yang perlu dikerjakan. Pada komponen isi kurikulum lebih banyak menitikberatkan pada pengalaman belajar yang harus dimiliki oleh peserta didik dalam kegiatan proses pembelajaran. Isi kurikulum hendaknya memuat semua aspek yang berhubungan dengan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang terdapat pada isi setiap mata

pelajaran yang disampaikan dalam kegiatan proses pembelajaran. Isi kurikulum dan kegiatan pembelajaran diarahkan untuk mencapai tujuan dari semua aspek tersebut.

Selanjutnya terdapat strategi pembelajaran atau biasa disebut dengan metode pembelajaran. Hal ini berkaitan dengan strategi yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Secara operasional strategi pembelajaran adalah prosedur dan metode yang ditempuh oleh pengajar untuk memberikan kemudahan bagi siswa melakukan kegiatan belajar secara aktif dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Suatu strategi pembelajaran merupakan suatu sistem menyeluruh yang terdiri dari lima variabel yakni tujuan pembelajaran, materi pelajaran, metode dan teknik mengajar siswa, guru, dan unsur penunjang. Strategi pembelajaran digunakan dalam setiap aktivitas belajar. Aktivitas belajar ini didesain agar memungkinkan siswa memperoleh muatan yang

ditentukan, sehingga berbagai tujuan yang ditetapkan, terutama maksud dan tujuan kurikulum, dapat tercapai. Komponen yang terakhir adalah merancang strategi penilaian atau evaluasi. Sistem penilaian merupakan bagian integral dalam suatu kurikulum yang bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai setelah pelaksanaan kurikulum. Evaluasi merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Dalam konteks kurikulum evaluasi dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum, atau evaluasi digunakan sebagai umpan balik dalam perbaikan strategi yang ditetapkan.

Perencanaan kurikulum pendidikan Islam mensyaratkan adanya muatan materi kurikulum yang memiliki jangkauan yang lebih jauh yaitu tidak hanya membekali siswa dengan seperangkat kompetensi keduniawian (artinya siap kerja) saja dengan skill, kecakapan hidup dan kompetensi lainnya, tetapi juga muatan mata pelajaran yang membekali siswa untuk

siap dalam menghadapi kehidupan yang lebih abadi atau kekal yaitu menghadap kehadiran Allah SWT. Sehingga jangkauan perencanaan kurikulumnya tidak hanya berbunyi dunia-kerja, tetapi dunia-akhirat.

Kurikulum yang realistis disusun berdasarkan prinsip-prinsip penting yang harus diperhatikan, diantaranya:

Perencanaan kurikulum berkenaan dengan pengalaman-pengalaman para siswa, Perencanaan kurikulum dibuat berdasarkan berbagai keputusan tentang konten dan proses, Perencanaan kurikulum mengandung keputusan-keputusan tentang berbagai isu dan topik, Perencanaan kurikulum melibatkan banyak kelompok, Perencanaan kurikulum dilaksanakan pada berbagai tingkat, Perencanaan kurikulum adalah sebuah proses yang berkelanjutan.

Perencanaan kurikulum menyangkut banyak dimensi.

Eisner menjelaskan bahwa ada beberapa unsur penting dari dimensi perencanaan kurikulum. Unsur tersebut yang akan menentukan logika dan karakteristik alur dari sebuah perencanaan kurikulum. Unsur tersebut

dapat disebutkan sebagai berikut: (1) Tujuan dan prioritas; (2) Isi kurikulum; (3) Jenis pembelajaran; (4) Organisasi pembelajaran; (5) Organisasi isi; (6) Model presentasi dan respon; (7) Jenis evaluasi.

2. Organisasi Kurikulum

Kurikulum yang dikembangkan lembaga pendidikan sebaiknya berisi tentang bahan belajar, program pembelajaran, hasil pembelajaran yang diharapkan, reproduksi kebudayaan, tugas dan konsep yang mempunyai karakteristik tersendiri, serta memberikan bekal untuk kecakapan hidup (lifeskill).

Organisasi kurikulum merupakan pola atau desain bahan kurikulum yang tujuannya untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran serta mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif. Rusman memberikan beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam organisasi kurikulum, di antaranya berkaitan dengan ruang lingkup (scope) dan urutan bahan pelajaran, kontinuitas kurikulum yang

berkaitan dengan substansi bahan yang dipelajari siswa, keseimbangan bahan pelajaran, dan alokasi waktu yang dibutuhkan.

Organisasi kurikulum, yaitu pola atau bentuk bahan pelajaran disusun dan disampaikan kepada murid-murid, merupakan suatu dasar yang penting sekali dalam pembinaan kurikulum dan bertalian erat dengan tujuan program pendidikan yang hendak dicapai, karena bentuk kurikulum turut menentukan bahan pelajaran, urutannya dan cara menyajikannya kepada murid-murid. Organisasi kurikulum adalah struktur program kurikulum yang berupa kerangka umum program pengajaran-pengajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik.

Dalam penyusunan organisasi kurikulum ada sejumlah faktor yang harus diperhatikan, yakni : (1) Ruang lingkup (Scope); Merupakan keseluruhan materi pelajaran dan pengalaman yang harus dipelajari siswa. Ruang lingkup bahan pelajaran sangat tergantung pada tujuan pendidikan yang hendak dicapai. (2) Urutan

bahan (Sequence); Berhubungan dengan urutan penyusunan bahan pelajaran yang akan disampaikan kepada siswa agar proses belajar dapat berjalan dengan lancar. Urutan bahan meliputi dua hal yaitu urutan isi bahan pelajaran dan urutan pengalaman belajar yang memerlukan pengetahuan tentang perkembangan anak dalam menghadapi pelajaran tertentu. (3) Kontinuitas; Berhubungan dengan kesinambungan bahan pelajaran tiap mata pelajaran, pada tiap jenjang sekolah dan materi pelajaran yang terdapat dalam mata pelajaran yang bersangkutan. Kontinuitas ini dapat bersifat kuantitatif dan kualitatif. (4) Keseimbangan; Adalah faktor yang berhubungan dengan bagaimana semua mata pelajaran itu mendapat perhatian yang layak dalam komposisi kurikulum yang akan diprogramkan pada siswa. Keseimbangan dalam kurikulum dapat ditinjau dari dua segi yakni keseimbangan isi atau apa yang dipelajari, dan keseimbangan cara atau proses belajar. (5) Integrasi atau keterpaduan; Yang berhubungan dengan bagaimana pengetahuan dan pengalaman yang

diterima siswa mampu memberi bekal dalam menjawab tantangan hidupnya, setelah siswa menyelesaikan program pendidikan disekolah.

Pada tahap pengorganisasian dan koordinasi ini merupakan tahap yang perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh oleh kepala madrasah. Kepala madrasah berkewajiban untuk mengelola dan mengatur penyusunan kalender akademik, jadwal pelajaran, tugas dan kewajiban guru, serta program kegiatan madrasah.

Kegiatan pengorganisasian kurikulum pendidikan agama Islam tampak melalui adanya kesatuan yang utuh dan terciptanya mekanisme yang sehat, sehingga kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses pengorganisasian tersebut menekankan pentingnya kesatuan dalam segala tindakan, dalam hal ini AlQur'an telah menyebutkan betapa pentingnya tindakan kesatuan yang utuh, murni dan bulat dalam suatu organisasi.

Menurut Nasution organisasi kurikulum adalah pola atau bentuk bahan pelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. Jadi pengorganisasian kurikulum merupakan implementasi dari fungsi manajemen itu sendiri. Dalam ilmu manajemen bahwasannya setidaknya memiliki empat fungsi yaitu planning (perencanaan), organizing (pengorganisasian), actuating (pengaplikasian) dan controlling (pengawasan). Pengorganisasian kurikulum dapat dilihat dari dua pendekatan, yaitu pendekatan manajemen dan pendekatan akademik. Pengertian dari kata organisasi itu sendiri adalah suatu sekelompok sosial yang bersifat tertutup atau terbuka terhadap pihak luar, yang diatur berdasarkan aturan tertentu, yang dipimpin atau diperintah oleh seorang pemimpin atau seorang pimpinan atau seorang staf administratif yang dapat melaksanakan bimbingan secara teratur dan bertujuan.

Dalam setiap jenis organisasi kurikulum, terdapat susunan kepengurusan yang telah ditentukan sesuai

dengan struktur organisasi berikut dengan tugas-tugas pekerjaannya sekaligus. Sedangkan bentukbentuk kurikulum akan disusun menurut pola organisasi kurikulum yang dilengkapi struktur, urutan kegiatan pembelajaran dan ruang lingkup materi tertentu.

3. Implementasi Kurikulum

Pelaksanaan kurikulum adalah proses yang memberikan kepastian bahwa proses belajar mengajar telah memiliki sumber daya manusia dan sarana serta prasarana yang diperlukan sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Nana yang dikutip oleh Rusman, mengemukakan bahwa untuk mengimplementasikan kurikulum sesuai dengan rancangan, dibutuhkan beberapa kesiapan, terutama kesiapan pelaksanaan. Sebagus apapun desain kurikulum yang dibuat semua tergantung kepada guru. Guru adalah kunci utama keberhasilan implementasi kurikulum.

Oemar Hamalik berpendapat bahwa, pelaksanaan kurikulum dibagi menjadi dua tingkatan yaitu

pelaksanaan kurikulum tingkat madrasah dan tingkat kelas. Dalam tingkat madrasah yang berperan adalah kepala madrasah dan pada tingkat kelas yang berperan adalah guru. Pada tingkat madrasah, kepala madrasah melaksanakan kegiatan kurikulum di antaranya adalah menyusun rencana kegiatan tahunan, menyusun rencana pelaksanaan program/unit, menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan, mengatur alat perlengkapan pendidikan, melaksanakan kegiatan bimbingan dan penyuluhan, merencanakan usaha-usaha peningkatan mutu guru. Pada tingkat kelas guru melaksanakan kurikulum dengan melakukan proses kegiatan belajar mengajar, mengatur pelaksanaan pengisian buku laporan pribadi, melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler, melaksanakan kegiatan evaluasi tahap akhir.

Implementasi kurikulum mencakup tiga tahapan pokok yaitu: (1)

Pengembangan program, mencakup program tahunan, semester atau catur wulan, bulanan, mingguan dan harian. Selain itu ada juga program bimbingan dan

konseling atau program remedial. (2) Pelaksanaan pembelajaran. Pada hakekatnya, pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku kearah yang lebih baik. (3) Evaluasi, proses yang dilaksanakan sepanjang proses pelaksanaan kurikulum caturwulan atau semester serta penilaian akhir formatif atau sumatif mencakup penilaian keseluruhan secara utuh untuk keperluan evaluasi pelaksanaan kurikulum. Implementasi kurikulum dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu: (1) Karakteristik kurikulum, yang mencakup ruang lingkup bahan ajar, tujuan, fungsi, sifat dan sebagainya. (2) Strategi implementasi, yaitu strategi yang digunakan dalam implementasi kurikulum seperti diskusi profesi, seminar, penataran, lokakarya penyediaan buku kurikulum dan berbagai kegiatan lain yang dapat mendorong penggunaan kurikulum di lapangan. (3) Karakteristik pengguna kurikulum, yang meliputi pengetahuan, keterampilan, serta nilai dan sikap guru terhadap kurikulum dalam pembelajaran.

Implementasi kurikulum pendidikan Islam merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi pendidikan Islam dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, ketrampilan maupun nilai, sikap, modal dan akhlak.

Implementasi kurikulum juga dapat diartikan sebagai aktualisasi

kurikulum tertulis dalam bentuk pembelajaran.

Implementasi kurikulum

merupakan suatu proses penerapan konsep, ide, program, atau tatanan

kurikulum ke dalam praktik pembelajaran atau aktivitas-aktivitas baru, sehingga terjadi perubahan pada sekelompok orang yang diharapkan untuk berubah. Implementasi kurikulum juga merupakan proses interaksi antara fasilitator sebagai pengembang kurikulum dan peserta didik sebagai subjek belajar.

Implementasi kurikulum pendidikan Islam adalah tindakan nyata dari rencana yang dibuat dalam

perencanaan untuk dilaksanakan secara konsisten dan kontinyu. Allah tidak suka dengan orang-orang yang sudah membuat suatu rencana tetapi tidak dilakukan dengan baik. Indikator keberhasilan dalam implementasi kurikulum pendidikan Islam adalah adanya wujud nyata dari apa yang direncanakan.

Inti dari implementasi adalah adanya aktivitas, aksi, tindakan dan mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh (penuh komitmen) berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh perencanaan dan evaluasi yang baik. Dengan demikian, maka implementasi kurikulum pendidikan Islam merupakan proses untuk melaksanakan ide, program atau seperangkat aktivitas pendidikan Islam dengan harapan terjadi perubahan pada pola pikir dan

perilaku peserta didik menjadi lebih baik dan sesuai dengan tuntunan Allah SWT.

4. Evaluasi Kurikulum

Evaluasi kurikulum merupakan kegiatan yang sangat penting untuk dilakukan karena bertujuan untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran yang dilakukan berjalan atau tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Evaluasi kurikulum adalah penelitian yang sistematis tentang manfaat, kesesuaian efektifitas dan efisiensi dari kurikulum yang diterapkan. Atau evaluasi kurikulum adalah proses penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan reliable untuk membuat keputusan tentang kurikulum yang sedang berjalan atau telah dijalankan. Evaluasi kurikulum ini dapat mencakup keseluruhan kurikulum atau masing-masing komponen kurikulum seperti tujuan, isi, atau metode pembelajaran yang ada dalam kurikulum tersebut.

Evaluasi dinyatakan sebagai suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis, yang bertujuan

untuk membantu pendidik memahami dan menilai suatu kurikulum, serta memperbaiki metode pendidikan. Evaluasi merupakan suatu kegiatan untuk mengetahui dan memutuskan apakah program yang telah ditentukan sesuai dengan tujuan semula. Evaluasi kurikulum dapat menyajikan informasi mengenai kesesuaian, efektifitas dan efisiensi kurikulum tersebut terhadap tujuan yang ingin dicapai dan penggunaan sumber daya, yang mana informasi ini sangat berguna sebagai bahan pembuat keputusan apakah kurikulum tersebut masih dijalankan tetapi perlu revisi atau kurikulum tersebut harus diganti dengan kurikulum yang baru. Evaluasi kurikulum juga penting dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi dan kebutuhan pasar yang berubah.

Menurut Stufflebeam yang dikutip oleh Rusman, tujuan utama evaluasi kurikulum ialah memberi informasi terhadap pembuat keputusan, atau untuk penggunaannya dalam proses menggambarkan hasil,

dan memberikan informasi yang berguna untuk membuat pertimbangan berbagai alternatif keputusan. Evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Untuk perbaikan program, bersifat konstruktif, karena informasi hasil evaluasi dijadikan input bagi perbaikan yang diperlukan di dalam program kurikulum yang sedang dikembangkan. Pertanggungjawaban kepada berbagai pihak, diperlukan semacam pertanggungjawaban dari pihak pengembang kurikulum kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Pihak tersebut baik yang mensponsori kegiatan pengembangan kurikulum maupun pihak yang akan menjadi konsumen dari kurikulum yang telah dikembangkan. Tujuan ini tidak dipandang sebagai suatu kebutuhan dari dalam melainkan lebih merupakan suatu 'keharusan' dari luar. Penentuan tindak lanjut hasil pengembangan, tindak lanjut hasil pengembangan kurikulum dapat berbentuk jawaban

atas dua kemungkinan pertanyaan: pertama, apakah kurikulum baru tersebut akan atau tidak akan disebarluaskan ke dalam sistem yang ada? kedua, dalam kondisi yg bagaimana dan dengan cara yang bagaimana pula kurikulum baru tersebut akan disebarluaskan ke dalam sistem yang ada? Dan untuk menghasilkan informasi yang diperlukan dalam menjawab pertanyaan diperlukan kegiatan evaluasi kurikulum.

Dalam manajemen kurikulum pendidikan Islam evaluasi merupakan salah satu fungsi yang harus dijalankan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT, dalam surat Al-Ankabut ayat 2-3.

Evaluasi kurikulum pendidikan Islam merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan peserta didik terhadap hasil proses pendidikan dan pembelajaran yang dilakukan di sekolah atau madrasah. Hal ini untuk mengetahui siswa mana yang telah mampu menguasai kompetensi tertentu atau belum.

BAB 3

PERENCANAAN KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM

A. Pengertian Perencanaan Kurikulum Pendidikan Islam

Berikut ini beberapa pengertian perencanaan, diantaranya:

- 1) Perencanaan adalah penggunaan analisis yang bersifat rasional dan sistematis terhadap proses pengembangan pendidikan yang bertujuan untuk menjadikan pendidikan lebih efektif dan efisien dalam menanggapi kebutuhan dan tujuan peserta didik dan masyarakat.
- 2) Menurut Susan Planning atau perencanaan adalah keseluruhan proses dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.
- 3) Menurut *kauffman* dalam *Purwanto* dalam *Hermino* perencanaan adalah proses penentuan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan

sumber yang diperlukan untuk seefisien dan seefektif mungkin.

- 4) Perencanaan merupakan keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang tentang hal hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan.
- 5) Menurut *Usman* perencanaan merupakan kegiatan yang akan dilaksanakan diwaktu yang akan datang untuk mencapai tujuan.

Sedangkan pengertian perencanaan kurikulum diutarakan oleh banyak ahli diantaranya:

- 1) Perencanaan kurikulum adalah perencanaan kesempatan. Kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai sampai mana perubahan perubahan telah terjadi pada diri siswa. Kurikulum adalah semua pengalaman yang mencakup yang diperoleh baik dari dalam maupun dari luar lembaga pendidikan yang telah direncanakan secara sistematis

dan terpadu, yang bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik mencapai tujuan pendidikan.⁵¹

- 2) Perencanaan pendidikan menurut *Engkoswara* dan *A.Komariah* yaitu kegiatan mengambil keputusan dan menetakannya yang mana keputusan tersebut berhubungan dengan tujuan yang akan dicapai, pemberdayaan sumber-sumber, pemilihan metode secara tepat agar pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu yang telah ditetapkan dapat berjalan efektif, efisien, dan mutunya terjamin.
- 3) Sedangkan Pengertian perencanaan kurikulum menurut *Rusman* adalah perencanaan kesempatan belajar yang dimaksud untuk membina anak didik kearah perubahan prilaku yang diinginkan dan menilai hingga mana perubahan-perubahan telah terjadi pada anak didik.
- 4) Perencanaan kurikulum yaitu suatu alat atau acuan yang menuntun tentang sumber daya manusia yang dibutuhkan, media yang akan dipakai, tindakan yang harus dilakukan, alokasi biaya, tenaga, sarana dan

prasarana yang dibutuhkan, sistem pengawasan dan monitoring, serta peran seluruh unsur ketenagaan didalam mencapai tujuan lembaga pendidikan.

- 5) *Beane James* mendefinisikan perencanaan kurikulum sebagai suatu proses yang melibatkan berbagai unsur peserta dalam banyak tingkatan membuat keputusan tentang tujuan belajar, cara mencapai tujuan, situasi pembelajaran, penelaahan keefektifan dan kebermaknaan metode tersebut.

Dari beberapa pengertian diatas tentang perencanaan dan perencanaan kurikulum, dapat disimpulkan yang dimaksud dengan perencanaan kurikulum pendidikan Islam yaitu sebuah analisis yang bersifat rasional dan sistematis yang disusun untuk menjadi acuan terkait sumber daya manusia yang dibutuhkan, media yang akan dipakai, tindakan yang harus dilakukan, alokasi biaya, tenaga, sarana dan prasarana yang dibutuhkan, sistem pengawasan dan monitoring, serta peran seluruh unsur ketenagaan didalam mencapai tujuan pendidikan Islam.

B. Pokok Bahasan Dalam Perencanaan Kurikulum

Perencanaan dirancang diawal sebelum kita melaksanakan langkah-langkah pengelolaan lainnya. Perencanaan menjadi sangat penting untuk dilaksanakan mengingat di dalam perencanaan ada proses penentuan tujuan yang ingin dicapai dan bagaimana langkah-langkah untuk mencapainya.

Ada beberapa pokok pembahasan dalam perencanaan, yaitu:

- 1) Tujuan apa yang dicapai dengan perencanaan itu;
- 2) Status sistem pendidikan yang ada dan bagaimana keadaannya sekarang;
- 3) kemungkinan-kemungkinan pilihan apa yang ditempuh untuk mencapai tujuan;
- 4) strategi yang terbaik untuk mencapai tujuan.

Parkey menegaskan bahwa tujuan yang direncanakan dari kurikulum dikembangkan melalui berbagai perspektif, teori dan penelitian yang didasarkan pada kekuatan sosial, pengembangan manusia dan pembelajaran serta model pembelajaran. Perencanaan

kurikulum hendaknya dilakukan dengan professional dengan menganalisa dan memperhatikan faktor – faktor yang berpengaruh terhadap perencanaan kurikulum diantaranya yaitu:

1) Kondisi sosiokultural

Yaitu dengan memperhatikan serta memanfaatkan narasumber yang ada dimasyarakat seperti para ahli psikologi pendidikan, pakar sosiologi, pemerhati anak, dan lain-lain. hal ini dikarenakan pendidikan adalah kegiatan behavior dimana terjadi proses interaksi antara siswa, guru, dan lingkungan.

2) Ketersediaan fasilitas

Perlu pendekatan “*bottom up*” yaitu melibatkan guru karena yang mengetahui kondisi di lapangan adalah para guru serta dengan tetap memperhatikan kesiapan fasilitas di lapangan.

Perencanaan kurikulum menyangkut banyak dimensi. *Eisner* menjelaskan bahwa ada beberapa unsur penting dari dimensi perencanaan kurikulum. Unsur tersebut yang akan menentukan logika dan karakteristik

alur dari sebuah perencanaan kurikulum.⁶⁰ Unsur tersebut dapat disebutkan sebagai berikut:

- 1) Tujuan dan prioritas;
- 2) Isi kurikulum;
- 3) Jenis pembelajaran;
- 4) Organisasi pembelajaran;
- 5) Organisasi isi;
- 6) Model presentasi dan respon;
- 7) Jenis evaluasi.

Perencanaan kurikulum merupakan proses yang melibatkan kegiatan pengumpulan, penyortiran, sintesis dan seleksi informasi yang relevan dari berbagai sumber. Informasi ini kemudian digunakan untuk merancang dan mendesain pengalaman-pengalaman belajar yang memungkinkan peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran. Dalam proses perencanaan ada hubungan tiga kegiatan perencanaan yang berurutan, yaitu: menilai situasi dan kondisi saat ini, merumuskan dan menetapkan situasi dan kondisi yang diinginkan, dan menentukan apa

saja yang perlu dilakukan untuk mencapai keadaan yang diinginkan.

Adapun perencanaan kurikulum pendidikan Islam mensyaratkan adanya muatan materi kurikulum yang memiliki jangkauan yang lebih jauh yaitu tidak hanya membekali siswa dengan seperangkat kompetensi akademik saja melainkan dengan kompetensi lainnya, tetapi juga muatan mata pelajaran yang membekali siswa untuk siap dalam menghadapi kehidupan yang lebih abadi/kekal yaitu menghadap kehadiran Allah SWT. Sehingga jangkauan perencanaan kurikulumnya tidak hanya berbunyi dunia kerja, tetapi juga dunia akhirat.

C. Unsur-Unsur yang Terlibat dalam Perencanaan Kurikulum

Menurut Oemar Hamalik, perencanaan kurikulum adalah suatu proses sosial yang kompleks yang menuntut berbagai jenis dan tingkat pembuatan keputusan. Perencanaan dan pengembangan kurikulum nasional pada umumnya telah dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional pada tingkat pusat. Karena itu pada level sekolah

yang paling penting adalah bagaimana mengimplementasikan dan mengadaptasi kurikulum tersebut dengan kegiatan pembelajaran. Di samping itu sekolah juga bertugas dan berwenang untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kondisi sekolah, karakteristik peserta didik, potensi daerah, kebutuhan masyarakat dan lingkungan setempat.

Perencanaan kurikulum melibatkan semua pihak baik guru, supervisor, administrator dan lainnya. Kepala sekolah sebagai *top management* di sekolah mempunyai tugas untuk membuat perencanaan, baik dalam bidang program pembelajaran dan kurikulum, guru dan kepegawaian, kesiswaan, keuangan maupun perlengkapan.

Namun yang perlu diperhatikan, semua guru harus dilibatkan dalam perencanaan kurikulum tingkat kelas. Bahkan pada tingkat (wilayah/daerah/distrik), ditingkat nasional harus ada representasi guru. Level perencanaan kurikulum menurut *Oliva* dimulai dari level kelas, kemudian *individual school, school district, state, region, nation* dan *world*. Dalam pendekatan yang sifatnya

“administrative approach” maka pihak atasan yang merencanakan kurikulum kemudian disampaikan ke instansi dibawahnya hingga ke guru. Guru tidak dilibatkan dalam proses perencanaanya karena memiliki peran pasif dan hanya sebagai pelaksana lapangan. Namun,ada juga pendekatan yang dimulai dari bawah dimana perencanaan dan perubahan kurikulum bersumber dari guru atau kepala sekolah dimana mereka terinspirasi oleh ide baru terkait kurikulum dan ingin menerapkannya untuk meningkatkan mutu pelajaran di sekolah mereka inilah yang disebut dengan pendekatan yang bersifat *“grass roots approach”*. *J.G Owen* sangat menekankan perlunya keterlibatan guru dalam perencanaan kurikulum. Guru harus ikut bertanggung jawab dalam perencanaan yang sudah disusun bersama. Di Inggris gagasan ini berwujud dalam bentuk *“teacher’s centeres”* yang dibentuk secara lokal sebagai tempat guru-guru bertemu dan berdiskusi tentang pembaharuan pendidikan. Disamping guru-guru berkumpul juga pengajar dari perguruan tinggi, pengusaha dan para konsumen lulusan sekolah.

D. Fungsi dan Tujuan Perencanaan Kurikulum

Didalam merancang kurikulum perlu perencanaan yang matang, dengan ketelitian dan kecermatan serta bersifat universal. Karena perencanaan kurikulum memiliki banyak fungsi diantaranya:

- 1) Berfungsi sebagai acuan dan memberi arahan tentang berbagai sumber daya yang diperlukan di dalam pembelajaran, seperti media yang digunakan, aktivitas pembelajaran yang akan dilaksanakan, sarana dan prasarana yang dibutuhkan, dan lainlain;
- 2) Berfungsi untuk mencapai tujuan yang sudah dirumuskan yang berakar dari tujuan pendidikan nasional;
- 3) Memiliki fungsi dan sifat adaptif artinya mampu dan mudah menyesuaikan dengan keadaan dan perubahan serta perkembangan yang terjadi disekitarnya;
- 4) Mengedepankan efektivitas dalam mencapai tujuan yang maksimal dan optimal serta efisiensi didalam penggunaan sumber daya yang tersedia.

Selain itu menurut Oemar Hamalik perencanaan kurikulum memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Perencanaan kurikulum berfungsi sebagai pedoman atau alat pengelolaan, yang berisi petunjuk tentang jenis dan sumber peserta yang diperlukan, media penyampaiannya, tindakan yang perlu dilakukan, sumber biaya, tenaga, sarana yang diperlukan, system control dan evaluasi, peran unsur-unsur ketenagaan untuk mencapai tujuan pengelolaan organisasi.
- 2) Perencanaan kurikulum berfungsi sebagai penggerak roda organisasi dan tata laksana untuk menciptakan perubahan dalam masyarakat sesuai dengan tujuan organisasi. Perencanaan kurikulum yang matang, besar sumbangannya terhadap pembuatan keputusan oleh pimpinan, dan oleh karenanya perlu memuat informasi kebijakan yang relevan, di samping seni kepemimpinan dan pengetahuan yang telah dimilikinya.
- 3) Perencanaan kurikulum berfungsi sebagai motivasi untuk melaksanakan sistem pendidikan sehingga mencapai hasil optimal.

Sedangkan tujuan perencanaan kurikulum yaitu:

- 1) Bertujuan sebagai acuan pengawasan, yaitu berfungsi untuk menghubungkan antara pelaksanaan dengan perencanaan;
- 2) Mengetahui jadwal kegiatan dan waktu selesainya;
- 3) Mengetahui keterlibatan sumber daya organisasi baik secara kualitas maupun kuantitas;
- 4) Sistematisasi kegiatan baik sisi biaya maupun kualitas kegiatan;
- 5) Efisiensi biaya, waktu, dan tenaga;
- 6) Gambaran kegiatan yang universal;
- 7) Mengkoneksikan antar sub kegiatan;
- 8) Menemukan secara dini kesulitan yang akan dihadapi dan membantu pencapaian tujuan.

E. Karakteristik Perencanaan Kurikulum

Ada beberapa aspek yang menjadi karakteristik perencanaan kurikulum diantaranya:

- 1) Memiliki konsep dasar yang jelas berdasarkan kebutuhan dasar manusia dan berbasis kebutuhan masyarakat;
- 2) Memperhatikan unsur proses belajar-mengajar yang efektif dan efisien;
- 3) Memberi peran dan tanggungjawab kepada pendidik didalam merancang dan melaksanakan program sekolah yang mengarahkan peserta didik menuju tujuan pendidikan;
- 4) Terbuka bagi masyarakat luas untuk dapat mengakses dan mendapat informasi terkait program-program pendidikan melalui perumusan tujuan pendidikan bagi anak-anak mereka;
- 5) Responsif terhadap kebutuhan peserta didik;
- 6) Sesuai bakat dan minat peserta didik dan masyarakat;
- 7) Pelibatan unsur masyarakat dan peserta didik dalam perencanaan kurikulum dan pembelajaran;
- 8) Perencanaan kurikulum terintegrasi dengan pengalaman belajar yang relevan.

Oemar Hamalik menyebut aspek-aspek yang menjadi karakteristik perencanaan kurikulum yaitu berdasarkan konsep yang jelas, dibuat dalam kerangka kerja yang komprehensif, bersifat reaktif, tujuan berkaitan dengan minat anak dan ada partisipasi kooperatif.

F. Landasan Perencanaan Kurikulum

Paling tidak ada lima hal yang memengaruhi perencanaan dan pembuatan keputusan dalam perencanaan kurikulum, yaitu filosofis, konten/materi, pengelolaan pembelajaran, pelatihan guru, dan sistem pembelajaran. Perencanaan kurikulum seharusnya berlandaskan kepada informasi dan data yang berkembang dan berhubungan erat dengan program dan kegiatan yang sedang berkembang di lembaga pendidikan atau sekolah. Fokus utama informasi dan data dalam perencanaan kurikulum di lembaga pendidikan adalah sebagai berikut:

- 1) Kekuatan sosial yaitu perencanaan kurikulum seharusnya beradaptasi dengan dinamika yang terjadi

ditengah masyarakat, seperti situasi politik,sosial,budaya,ekonomi.

- 2) Perlakuan pengetahuan yaitu merancang kurikulum berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dimana fakta dan data yang didapat dikumpulkan dan diolah serta dihubungkan dengan perilaku individu didalam proses belajar,bagaimana sikap,emosi,dan perasaan terhadap proses pembelajaran.
- 3) Pertumbuhan dan perkembangan manusia yaitu data dan informasi terkait dengan perkembangan manusia. Informasi dan data ini sangat penting dimana setiap kegiatan yang ada disekolah membuka ruang pengembangan program sekolah yang beradaptasi dengan kebutuhan peserta didik. Peran guru menjadi sangat penting untuk merencanakan kurikulum atau kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan siswa.

Dalam hal penyusunan kurikulum, Herman H. Horne memberikan dasar bagi penyusunan kurikulum menjadi tiga bagian, diantaranya adalah:

- 1) Dasar Psikologis, digunakan untuk memenuhi dan mengetahui kemampuan yang diperoleh dan kebutuhan peserta didik (*the ability and need of children*).
- 2) Dasar sosiologis, digunakan untuk mengetahui tuntutan masyarakat (*the legitimate demands of society*) terhadap pendidikan.
- 3) Dasar filosofis, digunakan untuk mengetahui nilai yang akan dicapai (*the kind of universe in which we live*).

Terkait dengan penyusunan kurikulum pendidikan Islam tidak cukup hanya didasarkan pada tiga landasan di atas, hal ini dikarenakan dalam pendidikan Islam ada usaha-usaha yang dilakukan untuk mentransfer dan menanamkan nilai-nilai agama sebagai titik sentral tujuan dan proses pendidikan Islam. Al-Syaibani memberikan landasan yang jelas tentang kurikulum pendidikan Islam yaitu:

- 1) Dasar agama, yang menjadi ruh dan target tertinggi dalam kurikulum. Dasar agama dalam kurikulum pendidikan Islam jelas harus didasarkan pada Al-

Qur'an, as-sunnah dan sumber-sumber yang bersifat *furu'* lainnya,

- 2) Dasar Falsafah, dasar ini memberikan pedoman bagi tujuan pendidikan Islam secara filosofis, sehingga tujuan, isi dan organisasi kurikulum mengandung suatu kebenaran dan pandangan hidup dalam bentuk nilai-nilai yang diyakini sebagai suatu kebenaran, baik ditinjau dari segi ontologi, epistemologi maupun aksiologi,
- 3) Dasar Psikologis, dasar ini memberikan landasan dalam perumusan kurikulum yang sejalan dengan ciri-ciri perkembangan psikis peserta didik, sesuai dengan tahap kematangan dan bakatnya, memperhatikan kecakapan pemikiran dan perbedaan perorangan antara satu peserta didik dengan yang lainnya;
- 4) Dasar Sosial, dasar ini memberikan gambaran bagi kurikulum pendidikan Islam yang tercermin pada dasar social yang mengandung ciri-ciri masyarakat islam dan kebudayaannya, baik dari segi pengetahuan, nilai-nilai

ideal, cara berfikir dan adat kebiasaan, seni dan sebagainya.

BAB 4

KONSEP DASAR PENGELOLAAN KEUANGAN PENDIDIKAN ISLAM

A. Pengertian Pengelolaan Keuangan Pendidikan

Pengelolaan keuangan pendidikan atau disebut juga dengan pembiayaan pendidikan adalah sejumlah kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan keuangan, pemanfaatan keuangan hingga pertanggung jawaban keuangan dengan harapan tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Menurut Nanang Fattah Pembiayaan pendidikan adalah sejumlah uang yang dihasilkan dan dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan pendidikan, seperti gaji guru, pengadaan sarana dan prasarana, peningkatan profesionalitas guru, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan supervisi pendidikan dan lain-lain. Sementara itu Sulistiyorini memaknai pengelolaan keuangan dalam arti sempit yang berarti pembukuan. Sementara itu dalam arti luas pengelolaan keuangan berarti pengurusan dan pertanggung jawaban dalam

menggunakan keuangan baik kepada masyarakat, pemerintah daerah, maupun kepada pemerintah pusat, dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai kepengawasan dan pertanggung jawaban keuangan. Senada dengan sulistiyorini, David Wijaya menyebutkan, pengelolaan keuangan sekolah adalah serangkaian kegiatan mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban keuangan sekolah. Pengelolaan keuangan pendidikan merupakan kegiatan pengurusan atau ketata usahaan keuangan meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban dan pelaporan. Dengan demikian pengelolaan keuangan pendidikan dapat dimaknai sebagai rangkaian aktivitas yang terdiri dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban keuangan sekolah.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat penulis simpulkan bahwa pengelolaan keuangan pendidikan adalah sejumlah aktivitas yang tersusun secara sistematis

dan sistemik mulai dari perencanaan, penggunaan keuangan, pengawasan dan evaluasi serta pertanggung jawaban dan pelaporan Menurut Bafadal dalam Agustinus Hermino pengelolaan keuangan memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) perencanaan anggaran tahunan,
- 2) pengadaan anggaran,
- 3) pendistribusian anggaran,
- 4) pelaksanaan anggaran,
- 5) pembukuan keuangan,
- 6) pengawasan dan pertanggung jawaban keuangan.

Selanjutnya menurut Agustinus, fungsi pengelolaan keuangan pendidikan memiliki makna yang lebih luas yakni: menyediakan informasi kuantitatif yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi pemangku kepentingan sesuai dengan perannya masing-masing, yakni :

- 1) Kepala sekolah; data keuangan sekolah akan dijadikan sebagai landasan kepala sekolah untuk menyusun

rencana sekolah, mengevaluasi kemajuan serta melakukan upaya korektif yang diperlukan,

- 2) Guru dan Karyawan sekolah; data keuangan sekolah berguna sebagai acuan untuk mengetahui kemampuan sekolah dalam memberikan imbal jasa, manfaat pension dan peluang kerja,
- 3) Kreditur, sebagai salah satu dasar pertimbangan bagi kreditur untuk mengetahui apakah pinjaman beserta bunganya dapat di bayar manakala jatuh tempo,
- 4) Orang tua siswa; bermanfaat bagi orang tua siswa untuk mengetahui kelangsungan hidup sekolah perjanjian jangka panjang sekolah dan tingkat ketergantungan sekolah,
- 5) Pemasok (*supplier*). Sebagai bahan informasi untuk mengetahui kemungkinan jumlah utang yang dimiliki sekolah pada saat jatuh tempo,
- 6) Pemerintah; untuk mengatur aktivitas sekolah dan menetapkan anggaran untuk tahun berikutnya,

- 7) Masyarakat. Membantu masyarakat dalam menyediakan informasi terkait pengelolaan keuangan sekolah serta rangkaian aktivitas sekolah.

B. Ruang Lingkup Pengelolaan Keuangan Pendidikan

Menurut Arwidayanto dkk, ruang lingkup pengelolaan keuangan pendidikan terdiri dari empat aspek kegiatan yakni: penyusunan atau perencanaan anggaran (*budgeting*), pembukuan (*accounting*), pemeriksaan, dan pertanggung jawaban.

a. Perencanaan Anggaran (*Budgeting*)

Budgeting adalah kegiatan mengidentifikasi tujuan, menentukan prioritas, menjabarkan tujuan kedalam penampilan operasional yang dapat di ukur, menganalisis alternatif, pencapaian tujuan, dengan analisis *cost effectiveness*, membuat rekomendasi alternatif pendekatan untuk mencapai sasaran. Dalam penyusunan anggaran pengelola keuangan perlu memperhatikan sumber-sumber keuangan yang ada, baik itu bersumberkan dari orang tua murid, komite, masyarakat, maupun pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Selain itu,

pengelola keuangan juga perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: (1) Hemat sesuai dengan kebutuhan, (2) terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, (3) tidak diperkenankan menggunakan dana untuk keperluan di luar keperluan kegiatan belajar dan mengajar.

b. Pembukuan (*Accounting*)

Pembukuan (*accounting*) dalam pengelolaan keuangan pendidikan meliputi dua hal: Pertama, pengurusan menyangkut kewenangan menentukan kebijakan menerima dan mengeluarkan uang. Kepengurusan ini disebut juga dengan istilah kepengurusan tata usaha. Kedua, kepengurusan yang menindak lanjuti urusan pertama yakni menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang dalam pengelolaan keuangan, hendaknya kepala sekolah memberikan arahan serta bimbingan kepada seluruh staf yang diberikan kepercayaan untuk mengelola keuangan sekolah. Berikut ini beberapa hal yang perlu dikenalkan pada staf berkaitan dengan pembukuan keuangan sekolah: buku pos, faktur, buku kas, lembar cek, jurnal, buku besar, buku kas pembayaran uang sekolah, buku kas piutang, neraca percobaan.

c. Pemeriksaan (*Auditing*)

Pemeriksaan (auditing) adalah kegiatan yang menyangkut pertanggung jawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendahara kepada pihak-pihak yang berwenang. Terdapat beberapa bentuk auditing yakni: (1) pemeriksaan laporan keuangan. Kegiatan ini bertujuan untuk menentukan apakah keseluruhan laporan keuangan merupakan informasi yang sudah terukur dan terverifikasi sesuai dengan kriteria tertentu. (2) pemeriksaan (audit) operasional adalah pemeriksaan atas keseluruhan atau bagian manapun dari prosedur atau metode operasi suatu organisasi yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi.

d. Pertanggung Jawaban

Pertanggung jawaban adalah pelaporan dibuat sebagai bentuk pertanggung jawaban keuangan kepada kalangan internal lembaga atau eksternal yang menjadi stakeholder lembaga pendidikan. Menurut Arwildayanto dkk, Pertanggung jawaban keuangan sekolah dapat diberikan sesuai dengan keperluan mulai setiap triwulan sekali, satu tahun sekali atau setiap pergantian kepemimpinan kepala

sekolah. Laporan keuangan ini diantaranya dapat ditujukan kepada: (1) kepala dinas pendidikan, (2) Kepala Badan Administrasi Keuangan Daerah (BAKD), dinas pendidikan daerah dan lain-lain.

C. Sumber-Sumber Keuangan Pendidikan

Di dalam UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 46 ayat 1 dinyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Hal ini juga disebutkan oleh Sulistiyorini bahwa secara garis besar sumber keuangan pendidikan dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu: (1) Pemerintah; Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun keduanya (2) Orang Tua Siswa (peserta didik) (3) Masyarakat, baik yang sifatnya mengikat maupun tidak mengikat.

a. Pemerintah

Sumber keuangan dari pemerintah disediakan melalui jalur Anggaran Rutin dalam Daftar Isian Kegiatan (DIK) yang dialokasikan kepada semua sekolah untuk setiap tahun ajaran. Dana ini lazim disebut dengan dana rutin. Dana dikeluarkan berdasarkan jumlah peserta didik kelas I, II, dan III. Mata anggaran dan besarnya dana untuk jenis

pengeluaran sudah ditentukan Pemerintah di dalam DIK. Pengeluaran dan pertanggung jawaban atas pemanfaatan dana rutin (DIK) harus benar-benar sesuai dengan anggaran tersebut. Selain DIK pendanaan dari pemerintah juga diberikan kepada setiap sekolah berupa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan secara berkala sebagai upaya pemerintah membantu pembiayaan operasional sekolah.

b. Orang Tua Siswa

Pendanaan dari orang tua peserta didik disebut juga dengan pendanaan dari masyarakat yang sifatnya mengikat. Pendanaan ini disebut juga dengan istilah iuran komite yang besarnya ditentukan melalui rapat komite. Pada umumnya dana komite dibedakan menjadi tiga jenis yakni, (1) Dana tetap bulanan. Adalah pendanaan yang wajib dibayar oleh orang tua peserta didik setiap bulannya selama menjadi peserta didik. (2) Dana incidental merupakan pendanaan yang diwajibkan kepada peserta didik baru dan pada umumnya hanya dibayarkan satu kali selama menjadi peserta didik. (3) Dana sukarela. Adalah pendanaan yang

diberikan secara suka rela oleh peserta didik atau orang tua peserta didik.

c. Masyarakat

Pendanaan pendidikan dalam kategori ini merupakan pendanaan dari masyarakat yang sifatnya suka rela baik secara pribadi maupun kelompok seperti yayasan, badan usaha milik pemerintah maupun swasta sebagai bentuk kepedulian terhadap kegiatan pendidikan di suatu sekolah.

d. Dana dari Alumni

Dana dari alumni adalah pendanaan yang diterima dari para alumni yang memiliki kepedulian terhadap peningkatan mutu lembaga pendidikan. Bantuan dari para alumni tidak hanya terbatas dalam bentuk uang, namun dapat pula berupa bantuan buku, perlengkapan sekolah atau bentuk tenaga seperti pengabdian diri untuk mengajar sebagai bentuk rasa syukur dan

terimakasih kepada lembaga pendidikan karena sudah memberikan ilmunya dan sebagai bentuk pembekalan diri terhadap dunianya yang baru terjun dalam dunia pendidikan. Dana ini dapat diterima dari alumni yang diberikan secara

langsung oleh individu maupun kelompok baik melalui acara perkumpulan para alumni maupun lustrum sekolah.

e. Dana dari Peserta Kegiatan

Dana dari peserta kegiatan adalah pendanaan yang bersumberkan dari kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak sekolah, pendanaan ini bisa bersumberkan dari peserta didik, guru, maupun masyarakat, tergantung bentuk acara yang diselenggarakan. Seperti kegiatan yang diperuntukkan untuk peningkatan kompetensi guru yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dan pendanaannya melibatkan guru, atau kegiatan ekstrakuler yang diberikan kepada peserta didik untuk pengembangan diri sesuai dengan bidang yang diinginkan peserta didik seperti kegiatan pengembangan diri tata boga, tata busana, pramuka, dan lain-lain.

f. Dana dari Kegiatan Kewirausahaan Sekolah

Banyak sekolah-sekolah saat ini yang mengembangkan usaha untuk meningkatkan keberdayaan sekolah dalam aspek pembiayaan. Kewirausahaan sekolah dapat dikembangkan dengan melibatkan masyarakat sekolah sendiri seperti peserta didik maupun guru, dan staf atau dengan

memberdayakan masyarakat sekitar. Seperti koperasi, kantin, fotokopi, bazar tahunan, perkebunan, toko serba ada dan lain-lain.

D. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Keuangan Pendidikan

a. Transparansi

Transparansi artinya keterbukaan. Transparansi dalam pengelolaan keuangan pendidikan berarti adanya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan mulai dari sumber-sumber keuangan, pemanfaatan hingga pertanggung jawaban keuangan pendidikan. Transparansi keuangan sangat diperlukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Transparansi juga akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan partisipasi orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam penyelenggaraan program pendidikan.

Selain itu transparansi juga akan meningkatkan tingkat kepercayaan antar orang tua, masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah melalui kemudahan dalam mengakses informasi-informasi keuangan pendidikan. Informasi keuangan pendidikan disebuah lembaga pendidikan dapat dituangkan melalui RAPBS yang ditempelkan di papan

pengumuman, ruang guru, ruang Tata Usaha (TU) maupun melalui media online web site lembaga pendidikan yang bersangkutan sehingga semua yang berkepentingan mudah mengetahui sumber keuangan serta pemanfaatannya.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pendidikan berarti penggunaan keuangan pendidikan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku pihak sekolah membelajarkan uang secara bertanggung jawab. Ada tiga syarat utama untuk terciptanya akuntabilitas public yakni: (1) Adanya transparansi dari penyelenggara pendidikan dalam hal masukan dan keikutsertaan mereka pada berbagai komponen sekolah; (2) Adanya standar kinerja sekolah dalam hal pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang; (3) adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana sekolah yang kondusif dalam

bentuk pelayanan pendidikan, dengan prosedur yang mudah, biaya murah, dan proses yang cepat.

c. Efektivitas

Efektivitas dimaknai sebagai ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan. Garner dalam Kompri mendefinisikan efektivitas lebih dalam lagi, efektivitas tidak sampai pada ketercapaian tujuan akan tetapi sampai pada kualitatif hasil yang dikaitkan pada tujuan dan visi misi lembaga. Pengelolaan keuangan dapat dikatakan memenuhi prinsip efektivitas manakala kegiatan yang diselenggarakan mampu mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang telah ditetapkan dan kualitas outcomenya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

d. Efisiensi

Efisiensi adalah perbandingan terbaik antara masukan (input) dan keluaran (output) atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud berupa pikiran, waktu, dan biaya. Dilihat dari segi penggunaan daya, penyelenggaraan kegiatan pendidikan dapat dikatakan efisien manakala mampu memanfaatkan waktu, tenaga dan biaya yang sekecil-kecilnya namun dapat mencapai tujuan yang telah

direncanakan. Dilihat dari segi hasil kegiatan pendidikan dapat dikatakan efisien manakala mampu memanfaatkan waktu, tenaga dan biaya tertentu mampu memberikan hasil yang sebaik-baiknya baik secara kualitas maupun kuantitas. Pengelolaan keuangan pendidikan perlu memperhatikan sejumlah prinsip sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.¹⁷ (1) Prinsip keadilan. Pelaksanaan prinsip keadilan yaitu : besarnya pendanaan pendidikan, (dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat) yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. (2) Prinsip Efisiensi, mengarah pada perbandingan antara pemasukan dan pengeluaran atau antara daya (waktu, pikiran, biaya) dengan hasil. (3) Prinsip transparansi, artinya menekankan adanya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan pendidikan, baik dari segi sumber keuangan pendidikan, jumlahnya, rincian kegunaannya, maupun pertanggung jawabannya. Secara keseluruhan harus jelas dan sesuai dengan kenyataannya dan pelaksanaannya. (4) prinsip akuntabilitas publik.

Artinya penggunaan keuangan sekolah harus dapat dipertanggung jawabkan, pengeluaran harus sesuai dengan perencanaan sekolah yang telah ditetapkan.

E. Tugas Pengelola Keuangan

Menurut Djoened Rastavara dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan menganut asas pemisahan tugas, yakni otorisator ordonator dan bendaharawan. Otorisator adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran anggaran. Ordonator adalah pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan. Bendaharawan adalah pejabat yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang serta memiliki kewajiban untuk melakukan perhitungan dan pertanggung jawaban.

Kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah memiliki fungsi sebagai otorisator dan dilimpahi fungsi ordonator untuk memerintahkan pembayaran. Kepala sekolah tidak dibenarkan melakukan fungsi bendahara karena kepala sekolah memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan ke dalam. Adapun

bendahara melaksanakan fungsi sebagai bendaharawan sekaligus dilimpahi tugas sebagai ordonator untuk melakukan pengujian hak atas pembayaran.

Manajer keuangan sekolah memiliki tugas untuk menentukan keuangan sekolah mulai dari cara mendapatkan dana, hingga pemanfaatan dana. Berikut ini diantara beberapa tugas manajer keuangan sekolah: (1) pengelolaan untuk perencanaan perkiraan, (2) pengelolaan memusatkan perhatian pada keputusan investasi dan pembiayaannya, (3) pengelolaan kerjasama dengan pihak lain, (4) penggunaan keuangan dan mencari sumber dananya.

F. Proses Pengelolaan Keuangan

a. Perencanaan Anggaran

Penganggaran terhadap sarana dan prasarana pembelajaran serta hal-hal lain yang berhubungan dengan keberlangsungan proses belajar dan mengajar merupakan hal yang penting untuk dilakukan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan. Anggaran merupakan rencana kuantitatif terhadap operasi sekolah, karenanya penganggaran tidak hanya terbatas pada aspek keuangan, anggaran juga dapat berupa non keuangan dari rencana

operasional yang telah ditetapkan. Proses penyiapan anggaran tersebut disebut juga dengan penganggaran yaitu kegiatan menyediakan anggaran untuk melaksanakan program yang telah direncanakan.

Menurut Terry dalam Syarifudin mengemukakan bahwa perencanaan adalah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. Perencanaan mencakup pengambilan keputusan karena termasuk pemilihan alternatif-alternatif keputusan. Selanjutnya menurut E. Mulyasa, perencanaan financial yang disebut budgeting adalah kegiatan mengkoordinasikan semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematis tanpa menyebabkan efek samping yang merugikan.

Dalam kegiatan perencanaan anggaran pembiayaan pendidikan, kepala sekolah memiliki kewajiban untuk menggerakkan sumber-sumber pendanaan pendidikan serta menyusun Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS). Dalam penyusunannya, hendaknya kepala sekolah melibatkan seluruh stakeholder sekolah sehingga seluruh anggota masyarakat sekolah merasa bertanggung

jawab terhadap keberhasilan rencana tersebut. Berdasarkan jenisnya, sumber pendanaan pendidikan dapat dikelompokkan kedalam tiga jenis yakni (1) Pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, Misalnya: Anggaran Rutin (DIK), anggaran operasional, pembangunan dan perawatan (OPF), Dana Penunjang Pendidikan (DPP), Bantua Operasional Sekolah (BOS). (2) Wali peserta didik, misalnya SPP. (3) Masyarakat, misalnya: sumbangan perusahaan industri, lembaga sosial donatur, tokoh masyarakat, alumni, dan lain-lain.

Untuk dapat menggerakkan sumber-sumber pendanaan tersebut, peran kepala sekolah untuk menyusun perencanaan yang baik mutlak diperlukan. Pentingnya perencanaan yang baik telah digambarkan di dalam al-Qur'an surat al -Hasyr :18-19, yang apabila diterjemahkan berbunyi: "Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, (akhirat), dan bertqawalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah

menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik.”

Dalam tafsir jalalain ayat tersebut ditafsirkan, (Hai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok) yakni untuk menghadapi hari kiamat (dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan). Dari sini dapat pula dipahami bahwa dalam pengelolaan keuangan pendidikan, perencanaan yang baik adalah suatu keniscayaan manakala menginginkan keberlangsungan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pendidikan, lebih-lebih di era teknologi seperti saat ini dimana guru bukan lagi satu-satunya sumber belajar peserta didik, perkembangan pendidikan yang dinamis menuntut seluruh pelaku pendidikan untuk meningkatkan kualitas diri agar tetap survive di tengah-tengah persaingan yang semakin berat. Namun jika direncanakan dengan baik semua ujian akan terasa ringan karena sudah disiapkan dengan baik.

- b. Strategi Mencari Sumber Dana Sekolah

Untuk mendukung keberlangsungan kegiatan pendidikan di sekolah, kepala sekolah dituntut untuk mampu menggali sumber-sumber pembiayaan, dengan pendanaan yang ada kepala sekolah bersama-sama dengan stakeholder mampu melakukan prediksi untuk menentukan target dan tujuan yang akan di capai. Berikut ini di antara strategi untuk menggali sumber pendanaan sekolah:

Pertama, Membangun usaha koperasi. Salah satu kompetensi kepala sekolah yang tidak kalah penting untuk membangun keberlangsungan sekolah adalah kompetensi kewirausahaan. kepala sekolah dituntut untuk mampu menggali sumber-sumber pembiayaan agar tetap survive dengan membangun usaha-suaha sekolah seperti pengembangan usaha koperasi. Koperasi merupakan salah satu bentuk usaha yang banyak dipilih oleh sekolah, baik sekolah negeri maupun swasta. Pengembangan usaha koperasi dinilai sangat strategis untuk menggali sumber pembiayaan sekolah, karena tidak hanya terbatas pada penyediaan barang saja berupa penyediaan perlengkapan sekolah siswa, namun lebih luas dari itu sekolah mampu menyediakan toko serba ada, menyediakan jasa seperti foto

kopi, bus antar jemput sekolah, penyediaan layanan jasa sewa ruko, rumah kos dan lain-lain. Dengan pengelolaan serta pengelolaan yang tepat tidak mustahil sekolah mampu memiliki kemandirian secara financial bahkan mampu memberdayakan masyarakat sekitar.

Kedua, Membuka kursus (kegiatan luar sekolah). Penyelenggaraan kegiatan berupa layanan kursus merupakan salah satu kegiatan yang bisa diselenggarakan sekolah untuk menggali sumber-sumber pembiayaan pendanaan. Kegiatan sifatnya terbuka untuk umum tidak diwajibkan bagi siswa. Kegiatan ini bisa dikembangkan dengan melibatkan masyarakat umum (luar sekolah) sebagai peserta. Kegiatan ini selain mampu meningkatkan kompetensi siswa untuk mengenali potensi yang dimiliki masing-masing siswa, kegiatan ini juga mampu menggali pembiayaan pendanaan sekolah untuk mencapai kemandirian pembiayaan. Di antara contoh-contoh bentuk usaha yang dapat dikembangkan dalam bentuk usaha kursus adalah : (1) kursus bahasa baik bahasa Inggris, bahasa Arab dan lain-lain, (2) kursus computer, (3) membuka kelas tari

atau pencak silat, kursus tata busana, (4) kursus tata boga dan lain-lain.

Ketiga, pengajuan proposal kepada pemerintah daerah dan swasta. Pengajuan proposal kepada pemerintah daerah maupun swasta merupakan salah satu cara kepala sekolah untuk mendapatkan bantuan dana. Namun pengajuan dana kepada pemerintah dan swasta ini tidak serta merta dan disetiap saat.

Keempat, penggalangan dana dari para donatur. Sumber pendanaan lain yang mampu digali oleh kepala sekolah adalah pendanaan yang bersumberkan dari para donatur, baik itu donatur tetap maupun tidak tetap.

Kelima, penggalangan dana dari para alumni. Penggalian dana dari para alumni yang sudah sukses bisa menjadi salah satu solusi bagi sekolah untuk menjaga keberlangsungan sekolah agar tetap survive. Penggalangan dana bisa bersifat tetap dan bisa juga tidak tetap.

Keenam, Dana orang tua siswa atau wali peserta didik. Sumber pembiayaan dari orang tua siswa dapat berupa sumbangan pelaksanaan pendidikan (SPP), Bantuan Pengembangan Pendidikan (BPP), biaya pendaftaran murid

baru, biaya ujian akhir semester, biaya ujian akhir sekolah, iuran ekstrakurikuler, iuran perpustakaan, bantuan-bantuan lain yang ditentukan sekolah.

c. Penggunaan Keuangan Sekolah

Dana yang berhasil dikumpulkan selanjutnya dibukukan dan diagendakan untuk selanjutnya dipergunakan untuk menunjang keberlangsungan kegiatan pembelajaran di sekolah. Dalam menggunakan dana sekolah, pengelola keuangan dituntut untuk berpegang teguh pada prinsip-prinsip pengelolaan seperti hemat tidak mewah, menggunakan dana sesuai dengan rencana dan program yang telah ditetapkan sekolah. Dalam Widjanarko, M DAN Suhertian, P.A disebutkan, staf yang dipilih untuk mengelola keuangan sekolah dituntut untuk memahami tugasnya sebagai berikut: pembukuan, peraturan yang berlaku dalam menyelenggarakan administrasi keuangan, memiliki dedikasi yang tinggi terhadap tugas dan pimpinan, memahami bahwa bertugas dibidang keuangan merupakan pelayanan, tanggap terhadap tugas, dan memahami bahwa kurang tanggapnya dalam bekerja akan mengurangi kelancaran pencapaian tujuan.

Berdasarkan SKB Mendikbud dan Menkeu No. 585/K/1987 dan 590/kmk 03/03/1987 tanggal 24 September 1987 kegiatan-kegiatan pengelolaan keuangan sekolah antara lain dialokasikan untuk: pemeliharaan sarana dan prasarana, PBM /KBM, pembinaan kegiatan siswa, dukungan kegiatan personil, kegiatan R.T Sekolah/ Komite sekolah.

d. Pengawasan dan Evaluasi Anggaran

Pengawasan anggaran adalah sejumlah aktivitas yang tersusun secara sistemik dan sistematis diawali kegiatan memonitor, memeriksa, menilai, dan melaporkan penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program-program pendidikan agar anggaran tersebut digunakan sebagaimana mestinya dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pengawasan dilaksanakan oleh kepala sekolah selaku manager sekolah untuk menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan, mencegah pemborosan dan penyelewengan dana, menjamin kepuasan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan sekolah.

Menurut Komaruddin langkah-langkah pengawasan adalah sebagai berikut: (1) pengembangan standar. Pengawasan dimulai dengan mengembangkan batasan atau rincian strategi spesifik dan praktis sebagai acuan pelaksanaan pengawasan. (2) pengukuran pelaksanaan, adalah kegiatan-kegiatan berupa pengumpulan informasi tentang kegiatan atau program yang sedang berlangsung dengan merujuk pada perencanaan yang telah ditetapkan. (3) penilaian pelaksanaan, adalah kegiatan menentukan makna terhadap adanya penyimpangan atau pelanggaran terhadap keuangan sekolah. (4) perbaikan. Merupakan kegiatan yang mengupayakan penyesuaian-penyesuaian atas perbedaan atau penyimpangan yang telah terjadi.

e. Pertanggung Jawaban Penggunaan Keuangan Sekolah

Pertanggung jawaban penggunaan keuangan sekolah adalah sebuah laporan keuangan dari keseluruhan pembiayaan kegiatan sekolah. Laporan dilakukan oleh bendahara dan staf sekolah. Laporan keuangan berisikan tentang pemasukan, pengeluaran dan pemakaian biaya. Dalam dunia pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan, semakin baik kondisi

keuangan sekolah maka semakin baik pula kemampuan sekolah dalam mendanai keperluan sekolah. Sebaliknya, sekolah yang tidak memiliki keuangan yang cukup, maka sekolah tidak akan mampu mendanai kegiatan sekolah.

BAB 5

ADMINISTRASI KEUANGAN PENDIDIKAN ISLAM

A. Pengertian Administrasi

Administrasi merupakan pekerjaan yang sangat menarik karena administrasi tumbuh dan berkembang sebagai ilmu sosial yang terkait dengan perilaku antar manusia dalam mencapai tujuan tertentu dalam sebuah wadah yang disebut dengan organisasi. Administrasi secara bahasa berarti melayani, membantu, memenuhi, melaksanakan, menerapkan, mengelola, mengusahakan atau mendayagunakan. Dalam arti yang sempit administrasi dimaksud sebagai ketatausahaan yang esensinya sebagai kegiatan penyusunan keterangan keterangan secara sistematis dan pencatatan secara tertulis.

Sedangkan secara istilah administrasi merupakan proses kerja sama yang dilakukan dua orang atau lebih dalam sebuah lembaga atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan definisi di atas, maka dapat

dipahami bahwa administrasi memiliki beberapa unsure sebagai berikut:

- 1) Adanya sekelompok manusia
- 2) Tujuan yang telah ditentukan,
- 3) Tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan,
- 4) Kerjasama,
- 5) Sarana prasarana
- 6) Biaya

Agar administrasi dapat berjalan dengan lancar maka diharapkan semua unsur tersebut harus dikelola dengan baik. Pada fase inilah peran administrator (pengawas, guru, dan kepala sekolah) sangat menentukan.

B. Administrasi Pendidikan

Administrasi pendidikan adalah semua usaha untuk mendayagunakan secara tepat sumber-sumber material dan personal yang tersedia untuk mencapai tujuan pendidikan. Definisi lain dikemukakan oleh Ngalm Purwanto sebagaimana yang dikutip oleh Syafaruddin dkk, bahwa administrasi pendidikan adalah segenap proses

pengarahan dan pengintegrasian segala sesuatu baik personel, spiritual dan material yang bersangkutan paut dengan pencapaian tujuan pendidikan. Adalah menarik untuk dicermati mengenai tujuan administrasi pendidikan sebagai berikut:

a. Efektivitas produksi.

Yaitu tercapainya sebuah tujuan yang jelas dan sesuai dengan harapan yang telah dicanangkan.

b. Efisiensi.

Yaitu sebuah upaya pemberdayaan segala sumber yang dimiliki untuk dimanfaatkan secara maksimal dan menghemat dari sisi waktu.

c. Kemampuan menyesuaikan diri.

Yaitu kemampuan sumber daya manusia menyesuaikan dengan lingkungan kerja.

d. Kepuasan kerja.

Yaitu adanya rasa senang dengan hasil yang telah diperoleh.

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa tujuan administrasi pendidikan adalah menggapai sebuah

hasil yang lebih maksimal dengan cara memanfaatkan sumber daya yang ada dalam organisasi. Dengan kata lain, fungsi dari administrasi pendidikan agar segala usaha kerjasama dalam mendayagunakan berbagai sumber dapat berjalan secara teratur, efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pendidikan.

C. Administrasi Keuangan

Salah satu cabang dari ilmu administrasi adalah tentang administrasi keuangan yang juga merupakan sub sistem dari administrasi pendidikan. Administrasi keuangan merupakan keseluruhan proses upaya memperoleh dan mendayagunakan semua dana. Secara teknis, administrasi keuangan berkaitan dengan persoalan budgeting atau penganggaran. Dalam hal ini keberadaan anggaran merupakan instrumen penting dalam hal perencanaan dan pengendalian serta sebagai alat bantu pengelolaan dalam mengarahkan suatu lembaga atau organisasi pada posisi yang kuat atau lemah.

Dalam konteks lembaga pendidikan, administrasi keuangan sekolah atau madrasah dapat dipastikan adanya proses yang sistematis agar administrasi keuangan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Adapun yang terkait dengan proses pengelolaan keuangan dalam lembaga pendidikan adalah sebagai berikut:

- 1) Perencanaan anggaran,
- 2) Strategi mencari sumber dana,
- 3) Penggunaan keuangan,
- 4) Pengawasan dan evaluasi anggaran,
- 5) Akuntabilitas

Pengelolaan keuangan sekolah secara ideal akan memberikan makna yang sangat signifikan dalam membangun dan mengembangkan lembaga pendidikan.

Untuk itu maka administrasi keuangan merupakan sebuah keniscayaan dalam mendukung dan mempermudah pelaksanaan program sekolah baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.

D. Administrasi Pendidikan Islam

Dalam pandangan ajaran Islam, segala sesuatu harus dilakukan dengan rapi, benar, tertib, dan teratur. Proses harus diikuti dengan baik, dan tidak boleh melakukan sesuatu dengan asal-asalan. Arah pekerjaan yang jelas, landasan yang mantap dan caracara menghasilkannya yang transparan merupakan amal perbuatan yang dicintai Allah SWT.

Menurut M. Yacoeb, bahwa konsep administrasi atau pengelolaan dalam pendidikan Islam yaitu: fleksibel, efektif, efisien, kooperatif dan partisipatif. Berikut ini merupakan penjelasannya:

1) Fleksibel

Pesan Alquran tentang fleksibilitas ini terdapat dalam surah AlHajj/22: 78 yaitu *“Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenarbenarnya. Dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan”*. Selain itu, juga dijelaskan dalam surah

AlBaqara/2: 185 *“Allah menginginkan kemudahan bagimu dan tidak menginginkan kesukaran bagimu”*.

2) Efektif dan Efisien

Terdapat dalam surah Al-Kahfi/18: 103-104 *“Katakanlah: Apakah akan Kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya. Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik baiknya”*. Sedangkan pada surah Al-Israa'/17: 26-27 juga dijelaskan sebagai berikut: *“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghamburhamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”*.

3) Terbuka

Di dalam surah An-Nisa'/4: 58 dijelaskan sebagai berikut: *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu*

menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.”

4) Kooperatif dan Partisipatif

Dalam surah Al-Maidah/5: 2 yang mendeskripsikan bahwa “*Bertolong-menolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan taqwa dan janganlah kamu bertolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan*”.

BAB 6

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengelolaan atau manajemen kurikulum merupakan kegiatan pengaturan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan atau evaluasi agar proses pendidikan dapat berjalan dan berhasil dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Manajemen kurikulum bertujuan untuk mencapai peningkatan mutu output dan outcome yang bermutu tinggi dan handal dengan cara memasukan input dan melakukan proses yang bermutu tinggi dan handal juga.

Manajemen keuangan di madrasah semua unsur yang terlibat dalam pelaksanaan manajemen tersebut dilakukan secara transparan, sehingga bila memang dana itu ternyata kurang, maka dapat dibicarakan dan ditanggung bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manab. (2014). *Pengelolaan Perubahan Kurikulum*. Jogjakarta: Kalimedia.
- Abdul Rohman. (2015). *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*. Semarang: CV. Karya abadi Jaya.
- Abdullah Idi dan Toto Suharto. (2014). *Praktik Kurikulum Pendidikan Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Abuddin Nata. (2001). *Sejarah Pendidikan Islam Pada Periode Klasik dan Pertengahan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ace Suryadi. (2014). *Pendidikan Indonesia Menuju 2025*. Bandung: Rosdakarya. *Jurnal Kependidikan Islam* Vol . 7 No. 1, Juni 2017
- Dinn Wahyudin. (2014). *Pengelolaan Kurikulum*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Djuwarijah," Strategi Peningkatan Pengelolaan Kurikulum dalam pengembangan Mutu SDM Menuju Terwujudnya Lulusan Madrasah Aliyah Berwawasan Internasional, h 205, *Jurnal El-Tarbawi Vol 1, No. 2, 2008*.
- Eisner E W. (2002). *The Education Imagination on the Design and Evaluation of School Program*. Ohio: Meril Prentice.
- Fitri, A. Z. (2013). *Manajemen kurikulum pendidikan Islam*.
- Giarti, S. (2016). *Manajemen Kurikulum Dan Pembelajaran Berbasis ICT*. Satya Widya, 32(2), 117-126.
- Hasan Langgulung. (1980). *Beberapa Pemikiran Tentang Pendidikan Islam*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Hermino, Agustinus. (2014). *Pengelolaan Kurikulum Berbasis Karakter*. Bandung: Alfabeta.
- Husaini Usman. (2010). *Pengelolaan Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara. Ibrahim Nasbi, *Pengelolaan Kurikulum: Sebuah Kajian Teoritis*, dalam *Jurnal Idaarah*, Vol I, No.2, Desember 2017, h 324

- Karni, Asrori. S. Etos Studi Kaum Santri Wajah Baru Pendidikan Islam, Jakarta : PT Mizan Publika, 2009.
- Lazwardi, D. (2017). Manajemen kurikulum sebagai pengembangan tujuan pendidikan. Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam, 7(1), 119-125.
- Miles, M. B dan M. Huberman, A. 1992. Analisis Data Kualitatif. Penerjemah TjetjepRohendi. Jakarta: UI-Press
- Muthalib, Abdul. Metode Penelitian Pendidikan Islam, Banjarmasin : Antasari Press, 2006
- Nasbi, I. (2017). Manajemen kurikulum: Sebuah kajian teoritis. Idaarah: Jurnal Manajemen Pendidikan, 1(2).
- Putra Daulay, Haideri. Dinamika Pendidikan Islam Di Asia Tenggara , Bandung : Cita Pustaka.2004
- Sista, T. R. (2017). Implementasi Manajemen Kurikulum Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. Educun: Jurnal Pendidikan Islam, 1(1).
- Sulfemi, W. B. (2019). Manajemen Kurikulum di Sekolah.
- Syafaruddin, S., & Amiruddin, A. (2017). Manajemen Kurikulum.
- Qomar, Mujamil. Manajemen Pendidikan Islam strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam, Surabaya: Erlangga, t.t.p.
- Wilatikta, A. (2020). Manajemen Kurikulum Pendidikan Agama Islam Jenjang Pendidikan Dasar: Kontekstualisasi Strategi Pembelajaran Semasa Pandemi. Ta'lim, 2(2), 1-12.

BIOGRAFI PENULIS

Dr. Riinawati, M.Pd, lahir di Benua Padang, 03 Mei 1986, putri dari H. Ahmad Bardi dan Hj. Juraidah (Alm) lulusan S3 Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Surabaya pada tahun 2017. Perempuan Asal Rantau ini adalah Dosen di UIN Antasari Banjarmasin. Beberapa Artikel yang telah ditulis antara lain di Faculty Of Education, Khon Khen University Thailand “Challenging Education For Future Change”, JARDCS USA , Universitas Negeri Surabaya (UNESA), buku yang berjudul Pengantar Teori Manajemen Komunikasi dan Organisasi (2019), buku berjudul Manajemen Perubahan Menuju Perguruan Tinggi Modern (2018) dan lain-lain.